

**“ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KETIMPANGAN SPASIAL KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2001-2013”**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

DINIAR RAHMAWATY

NIM. 12020110141007

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2014**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Diniar Rahmawaty

Nomor Induk Mahasiswa : 12020110141007

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KETIMPANGAN
SPASIAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
BANTEN TAHUN 2001-2013**

Dosen Pembimbing : Drs. Y. Bagio Mudakir, MT.

Semarang, 21 November 2014

Dosen Pembimbing,

(Drs. Y. Bagio Mudakir, MT.)

NIP. 19540609 198103 1004

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Diniar Rahmawaty
Nomor Induk Mahasiswa : 12020110141007
Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Ilmu Ekonomi dan
Studi Pembangunan\
Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KETIMPANGAN SPASIAL
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN
TAHUN 2001-2013**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 10 Desember 2014

Tim Penguji

1. Drs. Y. Bagio Mudakir, MT. (.....)
2. Dr. Dwisetia Poerwono, MSc (.....)
3. Mayanggita Kirana SE, MSc (.....)

Mengetahui
Pembantu Dekan I

Anis Chariri, SE., M.com. Ph.D. Akt
NIP 19670809 199203 1001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRISPI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Diniar Rahmawaty, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN SPASIAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2001-2013**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulisan aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 21 November 2014

Yang membuat pernyataan,

(Diniar Rahmawaty)

NIM : 12020110141007

MOTO dan PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya).” (QS. Al Fath [48]: 18)

“Kegagalan dan Kesuksesan itu karena Allah. Bila sudah ditakdirkan maka semua akan selalu diberikan kemudahan - Amin”

Ku persembahkan karya sederhana ini untuk :

Kedua Orang Tua tercinta,

Kakak-kakak tersayang,

Keluarga tercinta,

Mohammad Armidla Suharjono tersayang,

Sahabat dan teman terbaik,

ABSTRACT

Spatial inequality is an inequality between regions that may occur due to differences in available resources. This study aims to analyze the spatial inequality in Banten province during the period of 2001 to 2013. This study aims to analyze the influence of investment, Agglomeration, Government Expenditure and Labor Force.

The method used in this research is panel data with fixed effects approach (Fixed Effect Model) and the dummy regions. The use of dummy regions in this study aims to look at variations in conditions of inequality 6 spasioal districts/cities in Banten during the period 2001 to 2013. This study uses secondary data.

The results of this study indicates that the investment variable (I) and Variable Agglomeration (AG) positive, Government Expenditure variabel (GE) negativev and statistically significant ($\alpha = 5$ percent) on the level of spatial inequality. Meanwhile, the Working Age variable has no effect on spatial inequality.

Keywords: Spatial Inequality, Investment, Agglomeration, Government Expenditure, Working Age, and Panel Data

ABSTRAK

Ketimpangan spasial merupakan ketimpangan antar daerah yang dapat terjadi akibat perbedaan sumberdaya yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan spasial di Provinsi Banten selama periode waktu 2001 sampai 2013. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Investasi, Aglomerasi, Peneluaran Pemerintah dan Angkatan Kerja.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan pendekatan efek tetap (*Fixed Effect Model*) dan *dummy* wilayah. Penggunaan *dummy* wilayah dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat variasi kondisi ketimpangan spasial 6 kabupaten/ kota di Banten selama periode tahun 2001 hingga 2013. Penelitian ini menggunakan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel Investasi (I) dan Variabel Aglomerasi (AG) berpengaruh positif, Variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik ($\alpha = 5$ persen) terhadap tingkat ketimpangan spasial. Sementara, Variabel Angkatan Kerja tidak berpengaruh terhadap ketimpangan spasial.

Kata Kunci: Ketimpangan Spasial, Investasi, Aglomerasi, Pengeluaran Pemerintah, Angkatan Kerja, dan data panel

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN SPASIAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2001-2013”** dengan baik. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sarjana strata satu (S1) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini segala hambatan yang ada dapat teratasi berkat dukungan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tersayang : Hermansyah Daud dan Suhanah yang selalu berdoa, mencurahkan rasa cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan baik moril dan materiil sehingga penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta kakak-kakak yang telah memberi motivasi, semangat untuk kehidupan dan membuat penulis menjadi lebih dewasa.
2. Drs. Y. Bagio Mudakir, MT selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu membimbing dan memberikan dukungan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Drs. Mulyo Hendarto, MSP dosen wali yang selalu memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi selama penulis menjalani pendidikan di jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro..
4. Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, M.Si., Ph.D., Akt selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
5. Dr. Hadi Sasana, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
6. Seluruh Dosen yang telah membagikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan di jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
7. Mohammad Armidla Suharjono, yang insya Allah menjadi calon imam yang selalu berada disamping penulis ketika penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih karena telah memberi semangat, do'a, motivasi dan selalu bisa membuat tersenyum.
8. Teman-teman satu angkatan IESP 2010 yang kurang lebih empat tahun menjalani perkuliahan bersama dan teman jalan-jalan bersama, Terimakasih teman-teman.
9. Sahabat-sahabat terbaik Rini Asmita Samosir dan Cintami Rahmawati atas masukkan, saran, dan dorongan sehingga penulis dapat lebih termotivasi untuk menyelesaikan skripsi.

10. Sahabat-sahabat KKN (Kuliah Kerja Nyata) Desa Karang Sari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal yang telah memberi dukungan dan dorongan sehingga penulis dapat lebih semangat untuk mengerjakan skripsi.
11. Teman-teman Universitas Diponegoro yang telah memberikan kenangan manis dalam hidup saya selama menempuh kuliah di UNDIP.
12. Teman-teman seperjuangan dan seabimbingan skripsi : Eka, Wida, Desi yang telah memberikan dukungan dan informasi selama penyusunan skripsi.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis ucapkan terima kasih atas semua bantuan dan dukungan yang diberikan. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. Amin

Akhir kata dengan segala keterbukaan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 21 November 2014

Diniar Rahmawaty

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perkembangan Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan (miliar rupiah) Tahun 2001-2013.....	2
Tabel 1.2 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Banten Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/ Kota (miliar rupiah) 2010 – 2013.....	5
Tabel 1.3 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Banten Atas Dasar Harga Konstan Menurut Sektor Industri Pengolahan Kabupaten/ Kota (miliar rupiah) Tahun 2008 -2012	11
Tabel 2.1 Tipologi Klassen	39
Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu	64
Tabel 3.1 Uji Hausman	77
Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Provinsi Banten Tahun 2013	92
Tabel 4.2 Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Atas dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2013 (Juta Rupiah).....	93
Tabel 4.3 Komposisi Ketenagakerjaan Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Provinsi Banten Tahun 2001-2013 (Jiwa)	100
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Provinsi Banten Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Utama Tahun 2007-2013 (Jiwa).....	101
Tabel 4.5 Perkembangan Realisasi Investasi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2001-2013 (Jutaan Rupiah).....	103
Tabel 4.6 Perkembangan Aglomerasi Industri Pengolahan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2001- 2013	105

Tabel 4.7	Pengeluaran Pemerintah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2001-2013 (Jutaan Rupiah).....	107
Tabel 4.8	Perkembangan Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2001-2013 (Jiwa).....	109
Tabel 4.9	Indeks Total Entropy Theil Berdasarkan Kelompok Tipologi Klassen Provinsi Banten Tahun 2001-2013	111
Tabel 4.10	Tingkat Ketimpangan Spasial Berdasarkan Entropy Theil Provinsi Banten Tahun 2001-2013	112
Tabel 4.11	Tingkat Ketimpangan Spasial Berdasarkan Indeks Wiliamson Provinsi Banten Tahun 2001-2013	114
Tabel 4.12	Klasifikasi Kabupaten/Kota Provinsi Banten menurut Tipologi Klassen Tahun 2001-2013.....	116
Tabel 4.13	Tipologi Klassen Provinsi Banten Tahun 2001-2013	118
Tabel 4.14	Hasil estimasi regresi utama	119
Tabel 4.15	Auviliary Regression	120
Tabel 4.16	Hasil Uji Breusch-Godfrey (BG) Model	120
Tabel 4.17	Hasil Uji White Model Ketimpangan.....	121
Tabel 4.18	Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov	123
Tabel 4.19	Dummy Effect	126
Tabel 4.20	Persamaan Regresi Tiap Kabupaten/Kota Banten.....	126
Tabel 4.21	Koefisien Variabel <i>Dummy</i>	128

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perkembangan Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan (miliar rupiah) Tahun 2001-2013.....	2
Tabel 1.2 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Banten Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/ Kota (miliar rupiah) 2010 – 2013.....	5
Tabel 1.3 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Banten Atas Dasar Harga Konstan Menurut Sektor Industri Pengolahan Kabupaten/ Kota (miliar rupiah) Tahun 2008 -2012.....	11
Tabel 2.1 Tipologi Klassen	39
Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu	64
Tabel 3.1 Uji Hausman	77
Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Provinsi Banten Tahun 2013	92
Tabel 4.2 Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Atas dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2013 (Juta Rupiah).....	93
Tabel 4.3 Komposisi Ketenagakerjaan Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Provinsi Banten Tahun 2001-2013 (Jiwa)	100
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Provinsi Banten Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Utama Tahun 2007-2013 (Jiwa).....	101
Tabel 4.5 Perkembangan Realisasi Investasi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2001-2013 (Jutaan Rupiah).....	103
Tabel 4.6 Perkembangan Aglomerasi Industri Pengolahan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2001- 2013	105

Tabel 4.7	Pengeluaran Pemerintah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2001-2013 (Jutaan Rupiah).....	107
Tabel 4.8	Perkembangan Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2001/2013 (Jiwa).....	109
Tabel 4.9	Indeks Total Entropy Theil Berdasarkan Kelompok Tipologi Klassen Provinsi Banten Tahun 2001-2013	111
Tabel 4.10	Tingkat Ketimpangan Spasial Berdasarkan Entropy Theil Provinsi Banten Tahun 2001-2013	112
Tabel 4.11	Tingkat Ketimpangan Spasial Berdasarkan Indeks Wiliamson Provinsi Banten Tahun 2001-2013	114
Tabel 4.12	Klasifikasi Kabupaten/Kota Provinsi Banten menurut Tipologi Klassen Tahun 2001-2013.....	116
Tabel 4.13	Tipologi Klassen Provinsi Banten Tahun 2001-2013.....	118
Tabel 4.14	Hasil estimasi regresi utama	119
Tabel 4.15	Auviliary Regression	120
Tabel 4.16	Hasil Uji Breusch-Godfrey (BG) Model	120
Tabel 4.17	Hasil Uji White Model Ketimpangan.....	121
Tabel 4.18	Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov	123
Tabel 4.19	Dummy Effect	126
Tabel 4.20	Persamaan Regresi Tiap Kabupaten/Kota Banten.....	126
Tabel 4.21	Koefisien Variabel <i>Dummy</i>	128

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Tabel Indeks Gini Menurut Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2003-2012	3
Gambar 1.2 Perkembangan Rasio Gini Provinsi Banten Tahun 2003-2013.....	6
Gambar 1.3 Perkembangan Investasi Provinsi Banten Tahun 2001-2013 (Rupiah)	7
Gambar 1.4 Perkembangan Aglomerasi Provinsi Banten Tahun 2001-2013	8
Gambar 1.5 Perkembangan Tingkat Angkatan Kerja Provinsi Banten Tahun 2001-2013 (Jiwa)	9
Gambar 1.6 Perkembangan Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2001-2013 (Miliar Rupiah)	10
Gambar 2.1 Penduduk dan Tenaga Kerja	55
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	70
Gambar 4.1 6 Kabupaten/Kota Provinsi Banten	90
Gambar 4.2 Perkembangan PDRB Per Kapita ADHK Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2001-2013	96
Gambar 4.3 Perkembangan Jumlah Perusahaan Industri Pengolahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2001-2013.....	98

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Data Mentah Tingkat ketimpangan, Investasi, Aglomerasi, Pengeluaran Pemerintah, dan Angkatan Kerja Di 6 Kabupaten/Kota Banten Tahun 2001-2013	138
Lampiran B Hasil Regresi Utama Model Ketimpangan Di Banten Tahun 2001-2013	146
Lampiran C Hasil Uji Asumsi Klasik Model Ketimpangan Di Banten Tahun 2001-2013.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia telah melakukan upaya-upaya pembangunan untuk mengejar ketertinggalannya dari negara lain. Namun proses pembangunan yang telah dijalankan masih jauh dari apa yang diharapkan. Permasalahan pembangunan yang masih jelas terlihat adalah ketimpangan pembangunan antar daerah yang disebabkan oleh perbedaan hasil pembangunan.

Tujuan bernegara adalah untuk mencapai pembangunan ekonomi yang merata, hal ini dapat dicapai apabila pembangunan ekonomi regionalnya baik. pembangunan ekonomi dalam konteks nasional maupun regional (tata ruang atau spasial), pada dasarnya sama secara keseluruhan. Pembangunan pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang mengarah pada distribusi pendapatan yang lebih merata. Apabila pembangunan secara regional memperoleh hasil rata-rata yang baik, maka memungkinkan pembangunan dalam tingkat nasional juga baik

Menurut para ekonom dalam Arsyad (1999), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur Ekonomi terjadi atau tidak. Hal tersebut dapat diartikan pertumbuhan ekonomi hanya melihat kenaikan dari pendapatan nasional atau dalam hal ini adalah GDP atau PDB. Pendapatan nasional menunjukkan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai pada suatu tahun tertentu, sedangkan pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun (Lincoln Arsyad, 2010).

Tabel 1.1
Perkembangan Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2001-2013 (Miliaran Rupiah)

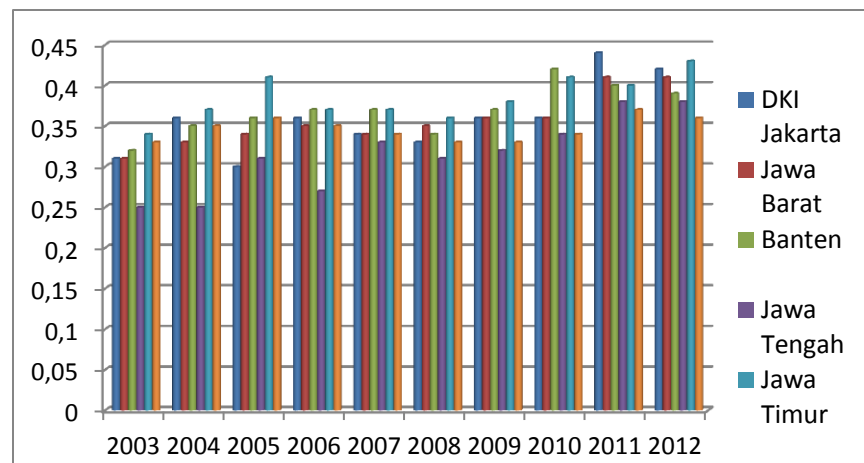
TAHUN	PDB	PERTUMBUHAN
2001	1.440.405,70	3,6
2002	1.505.216,40	4,5
2003	1.577.171,30	4,8
2004	1.656.516,80	5,0
2005	1.750.815,20	5,7
2006	1.847.126,70	5,5
2007	1.964.327,30	6,3
2008	2.082.456,10	6,0
2009	2.178.850,40	4,6
2010	2.314.458,80	6,2
2011	2.464.566,10	6,5
2012	2.618.938,40	6,3
2013	2.770.345,10	5,8

Sumber: BPS (data diolah)

Dari tabel di atas, menunjukkan perkembangan Produk Domestik Bruto Indonesia tahun 2001-2013 yang positif pasca krisis ekonomi tahun 1998/1999. Pada tahun 2006 pertumbuhan PDB Indonesia mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 5,7% menjadi 5,5%. Penurunan pertumbuhan PDB juga terjadi pada tahun 2008, dimana pertumbuhan PDB yaitu 6,3% pada tahun 2007 dan 6,0% pada tahun 2008. Penurunan pertumbuhan pada tahun 2008 ini terjadi disebabkan karena krisis global yang terjadi pada Negara Amerika yang berdampak pada seluruh Negara termasuk Indonesia.

Pulau Jawa secara administratif terbagi menjadi empat provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten; serta dua wilayah khusus, yaitu DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Menurut BPS, Indeks gini adalah salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Gambar 1.1 menjelaskan tingkat ketimpangan di Pulau Jawa berdasarkan Indeks Gini.

Gambar 1.1
Tabel Indeks Gini menurut Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2003-2012



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Dari gambar 1.1 dapat dilihat bahwa dalam 10 tahun terakhir DKI Jakarta , Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten , dan Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat ketimpangan yang beragam. Provinsi Banten memiliki tingkat ketimpangan tertinggi kedua di Provinsi Jawa berdasarkan Indek Gini.

Setelah diberlakukannya UU RI No. 32 dan 33 tahun 2004, peranan Pemerintah Daerah sangat dominan dalam menentukan kebijakan didaerahnya. Salah satu strategi pembangunan nasional adalah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan cara memperhatikan pada pembangunan ekonomi daerah kabupaten dan kota. Pembangunan ekonomi daerah yang merata antara kabupaten dan kota diharapkan akan memberikan kontribusi pada pembangunan nasional.

Provinsi Banten merupakan daerah hasil pemekaran. Penetapan Provinsi Banten disahkan pada tanggal 17 Oktober 2000 didasari oleh UU No.23 Tahun 2000. Berdasarkan hasil pemekaran tahun 2000, saat ini Provinsi Banten memiliki 8 daerah administrasi yaitu terdiri dari 4 kabupaten dan 4 kota dan Kota Serang dipilih sebagai ibukota provinsi. Keempat kabupaten tersebut adalah Tangerang, Serang, Pandeglang dan Lebak, sedangkan keempat kota yaitu Tangerang Kota, Serang, Cilegon dan Kota Tangerang Selatan. Pada penelitian ini Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan dimasukkan pada daerah induk yaitu Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang dikarenakan kedua kota tersebut merupakan daerah baru hasil pemekaran pada tahun 2008 dan 2009 sehingga ketersediaan data yang relatif sedikit.

Tabel 1.2
Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Banten Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Kabupaten/ Kota (miliar rupiah) 2010 – 2013

Kabupaten/ Kota	2010	2011	2012	2013
Kab. Pandeglang	4321,14	4547,85	4803,37	5018,45
Kab. Lebak	4156,14	4387,62	4607,59	4872,70
Kab. Tangerang	23849,66	25549,68	27255,37	28912,41
Kab. Serang	10048,82	10646,61	11232,28	11963,66
Kota Tangerang	29402,85	31414,10	33428,91	35411,36
Kota Cilegon	17107,19	18228,29	19470,57	20624,74
JUMLAH	88885,82	94774,15	100816,08	106803,31

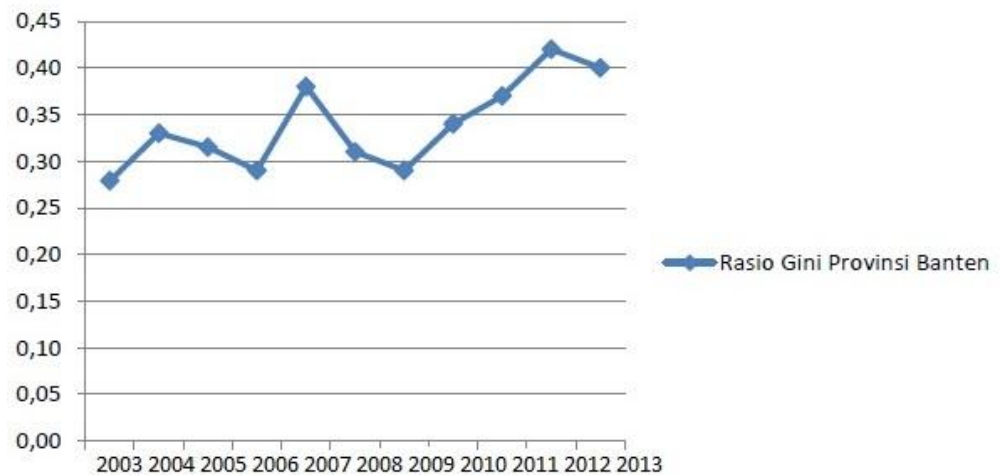
Sumber: BPS Provinsi Banten

Berdasarkan Tabel 1.2 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Banten Atas Dasar Harga Konstan, dapat terlihat bahwa pada tahun 2010 Kota Tangerang memiliki PDRB terbesar yaitu 29402,85 dan Kabupaten Lebak memiliki PDRB terendah 4156,14. Pada tahun 2011, PDRB terbesar tetap dimiliki oleh Kota Tangerang yaitu 31414,10 dan PDRB terendah tetap dimiliki oleh Kabupaten Lebak yaitu 4387,62. Sementara pada tahun 2012, PDRB tertinggi tetap dimiliki oleh Kota Tangerang yaitu 33428,91 dan terendah tetap dimiliki oleh Kabupaten Lebak yaitu 4607,59. Dan pada tahun 2013 PDRB tertinggi pada Kota Tangerang yaitu 35411,36 dan terendah pada Kabupaten Lebak yaitu 4872,70.

Data yang ditunjukkan Tabel 1.2 mengenai PDRB menurut Kabupaten dan Kota didukung oleh hasil penelitian Priyanto (2009) yang menyebutkan Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang merupakan kabupaten yang

berada pada kuadran 4 berdasarkan *Klassen Typology*. Menurut *Klassen Typology* kuadran 4 menunjukkan bahwa daerah tersebut merupakan daerah yang relatif tertinggal (*low growth and low income*) serta memiliki pertumbuhan dan pendapatan perkapita dibawah angka provinsi.

Gambar 1.2
Perkembangan Rasio Gini Provinsi Banten Tahun 2003-2013



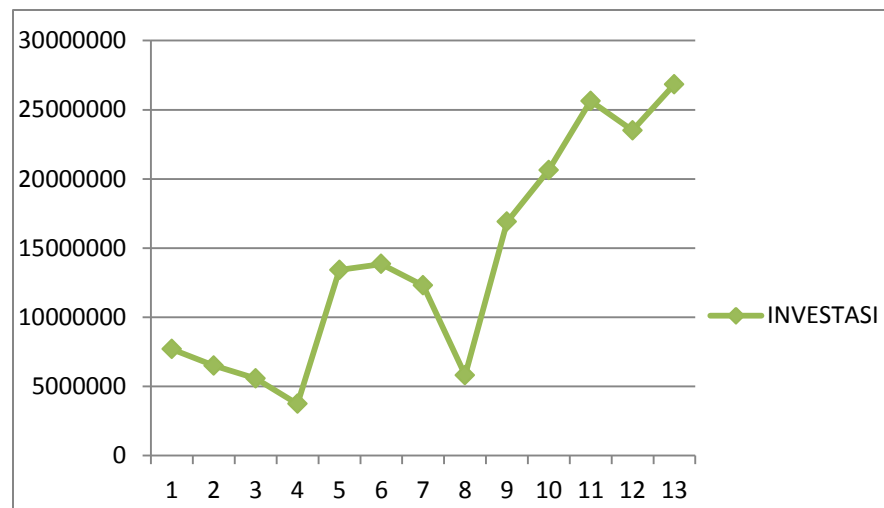
Sumber: BPS Provinsi Banten

Berdasarkan Gambar 1.2 diatas tentang perkembangan rasio gini Provinsi Banten tahun 2003-2013, dapat terlihat bahwa dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2013 tingkat ketimpangan yang tercermin dari rasio gini cenderung meningkat. Pada tahun 2003 rasio gini Provinsi Banten berada pada angka 0,28 atau dapat dikatakan tingkat ketimpangan masih dalam kategori rendah, sedangkan pada tahun 2013 rasio gini Provinsi Banten meningkat menjadi 0,40. Sejak berdirinya Provinsi Banten pada tahun 2001 sampai tahun 2011, dapat disimpulkan tingkat ketimpangan di Provinsi Banten meningkat.

Menurut Sjafrizal (2012) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah yaitu 1) perbedaan sumber daya alam, 2) faktor demografis termasuk kondisi tenaga kerja, 3) alokasi dana pembangunan antar wilayah baik investasi pemerintah maupun investasi swasta, 4) konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan 5) mobilitas barang dan jasa.

Investasi merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Menurut Myrdal (1957) dalam Jhingan (2010) mengungkapkan bahwa investasi akan berpotensi menyebabkan terjadinya ketimpangan. Provinsi Banten merupakan daerah potensial yang menjadi sasaran investasi dikarenakan keuntungan lokasi dan sumber daya yang dimilikinya.

Gambar 1.3
Perkembangan Investasi Provinsi Banten Tahun 2001-2013 (Rupiah)



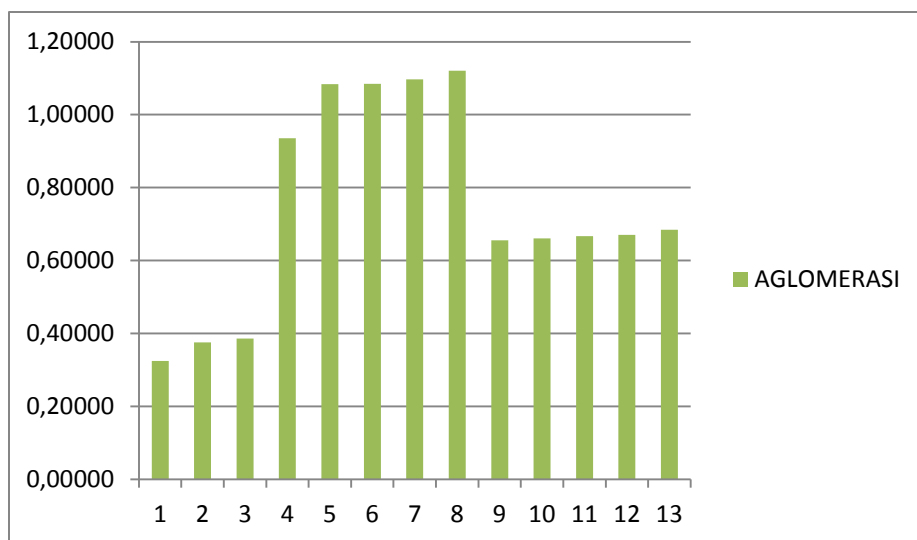
Sumber: BPS Provinsi Banten

Berdasarkan Gambar 1.3 tentang perkembangan investasi tahun 2001-2013. Gambar tersebut menggambarkan perkembangan Investasi di Provinsi Banten

mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat. Pada tahun 2001 Investasi sebesar 7.690.111,11 dan meningkat pada tahun 2013 menjadi 26.836.634,14.

Faktor lain penyebab ketimpangan spasial adalah adanya aglomerasi. Keuntungan aglomerasi yang timbul karena terjadinya konsentrasi beberapa kegiatan ekonomi terkait pada suatu daerah tertentu. Gambar 1.4 menjelaskan tingkat perkembangan aglomerasi pada Provinsi Banten.

Gambar 1.4
Perkembangan Aglomerasi Provinsi Banten Tahun 2001-2013

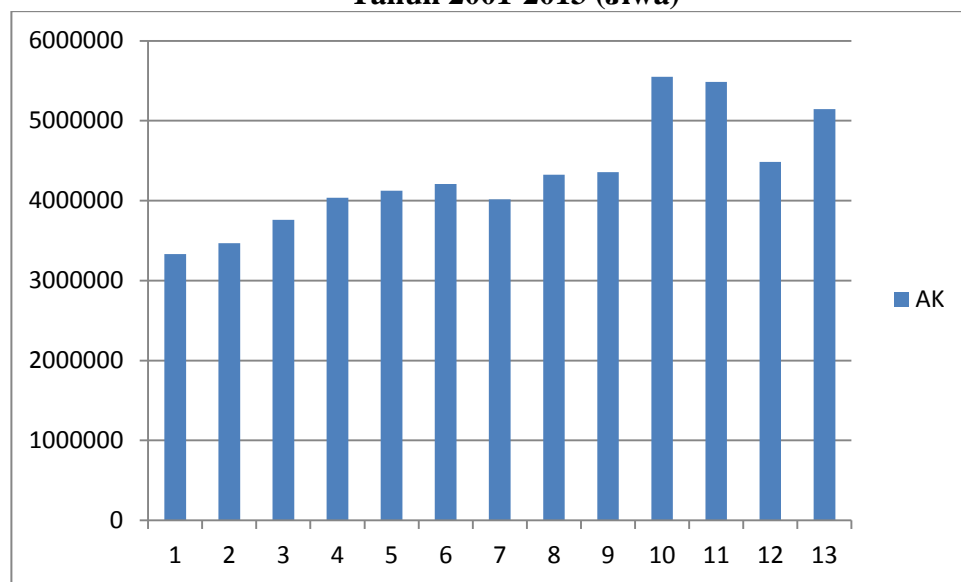


Sumber: BPS Provinsi Banten

Berdasarkan Gambar 1.4 menjelaskan perkembangan aglomerasi Provinsi Banten Tahun 2001-2013. Perkembangan aglomerasi pada Provinsi Banten mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Pada tahun 2001 tingkat aglomerasi sebesar 0,32 dan tertinggi pada tahun 2008 sebesar 1,12. Pada tahun 2013 tingkat aglomerasi sebesar 0,68.

Tidak hanya investasi yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan spasial, faktor perbedaan demografi juga memiliki peranan dalam mempengaruhi tingkat ketimpangan. Gambar 15. menggambarkan tentang perkembangan tingkat Angkatan Kerja di Provinsi Banten tahun 2001-2013.

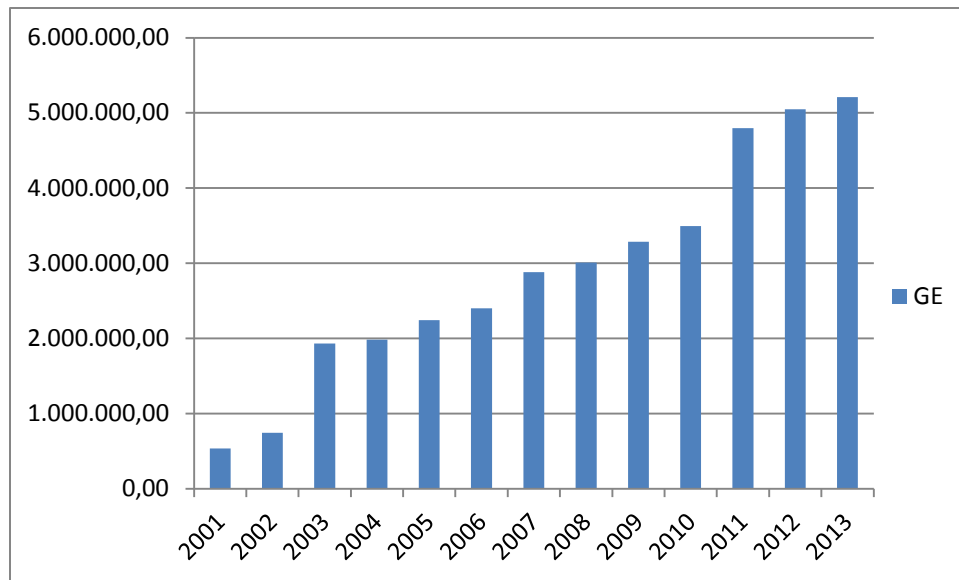
Gambar 1.5
Perkembangan Tingkat Angkatan Kerja Provinsi Banten
Tahun 2001-2013 (Jiwa)



Sumber: BPS Provinsi Banten

Berdasarkan Gambar 1.5 menjelaskan perkembangan tingkat angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan faktor pendorong perekonomian. Pada tahun 2001 sebesar 3.330.224 dan pada tahun 2013 menjadi sebesar 5.146.305. Tingginya angkatan kerja pada suatu daerah memiliki dampak positif berupa semakin tingginya output, dan dampak negatifnya apabila ketersediaan lapangan pekerjaan yang tersedia lebih rendah dibanding jumlah angkatan kerja.

Gambar 1.6
Perkembangan Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten
Tahun 2001-2013 (Miliar Rupiah)



Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

Berdasarkan Gambar 1.6 menjelaskan Perkembangan pengeluaran pemerintah Provinsi Banten Tahun 2001-2013. Perkembangan pengeluaran pemerintah Provinsi Banten selama tahun penelitian memiliki trend yang meningkat. Pada tahun 2001 pengeluaran pemerintah sebesar 534.043,99 dan meningkat pada tahun 2013 menjadi 5.210.795,09.

Pembangunan dalam lingkup spasial tidak selalu berlangsung secara merata, Beberapa daerah mampu mencapai pertumbuhan yang cepat, dan ada beberapa daerah lain yang tidak mampu mencapai sasaran pertumbuhan atau bahkan mengalami proses pertumbuhan yang lambat dikarenakan perbedaan sumber-sumber yang dimiliki, adanya kecenderungan investor memilih daerah perkotaan yang memiliki

kelengkapan infrastruktur penunjang, dan tenaga kerja yang terlatih, Pemasalahan pembangunan dalam lingkup spasial ini akan mengindikasikan terjadinya ketimpangan.

Tabel 1.3
Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Banten Atas Dasar Harga Konstan Menurut Sektor Industri Pengolahan Kabupaten/ Kota (miliar rupiah) Tahun 2008 -2012

Kab/Kota	2008	2009	2010	2011	2012
Kab. Pandeglang	438.456,66	456.270,83	473.163,81	501.277,51	520.236,24
Kab. Lebak	354.578	360.131	367.915	381.614	396.856,21
Kab. Tangerang	10.905.301	11.143.371	12.001.143,6	12.812.436,8	12.925.865,1
Kab Serang	4.337.593,9	4.403.134,1	4.429.255,18	4.458.636,27	4.557.060,5
Kota Tangerang	13.229.927	136.02,21	14.181,29	14.867,63	15.242,67
Kota Cilegon	6.848.341,04	7.014.837,16	12.399.688,73	13.218.285,53	14.107.542,93

Sumber: BPS Provinsi Banten

Berdasarkan kontribusinya kepada PDRB, sektor industri manufaktur di Provinsi Banten menunjukkan kinerja yang baik. Namun tidak semua kabupaten dan kota di Provinsi Banten mempunyai kondisi tersebut. Ini terlihat dari sumbangan pada PDRB menurut sektor industri manufaktur dari tahun 2008-2012.

Perkembangan industri manufaktur yang pesat di Indonesia ternyata bias ke Pulau Jawa dan Sumatera. Ini jelas terlihat mencolok untuk Industri Besar dan Sedang (IBS), yang sering diasosiaikan dengan industri manufaktur yang modern (Arifin: 2003). Hal ini didukung oleh hasil penelitian Kuncoro (2002) bahwa di Jawa Tengah konsentrasi spasial industri hanya ada di daerah Semarang dan sekitarnya yang meliputi kota dan Kabupaten Semarang, Kabupaten Kudus dan Surakarta

sekitarnya yang meliputi Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo. Kenyataan diatas menunjukkan masih adanya disparitas atau ketidakmerataan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain.

Dikebanyakan negara sedang berkembang, distribusi industri dan penduduk yang timpang mengelompok di sekitar ibukota negara menjelaskan bahwa aktifitas ekonomi, khususnya industri manufaktur cenderung untuk terkonsentrasi secara geografis di beberapa tempat saja. Sejalan dengan pernyataan yang mengatakan bahwa proses industrialisasi merupakan salah satu perantara menuju proses pembangunan yang baik dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka peran industri semakin penting dalam peningkatan perekonomian.

Provinsi Banten merupakan provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Kesuksesan ini ditopang oleh sumbangan sektor industri manufaktur pada PDRB. Perkembangan industri manufaktur yang pesat ini berbanding terbalik dengan persebaran industri secara geografis. Hal ini disebabkan oleh kecendrungan investor yang memilih investasi dikota-kota besar, sehingga daerah penyangga mengalami kekurangan investasi. Kota besar yang mendapatkan banyak investasi ini akan mengalami pemusatan aktivitas ekonomi yang disebut aglomerasi. Pemusatan ekonomi suatu daerah akan mempunyai pengaruh yang merugikan bagi daerah-daerah lain, karena tenaga kerja yang ada, modal, perdagangan, akan pindah ke daerah yang melakukan pemusatan ekonomi.

Keuntungan dari aglomerasi ini diharapkan mampu memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Adapun dampak negatif yang

dihasilkan dari aglomerasi adalah padatnya penduduk di suatu kota karena akibat berpindahnya penduduk desa ke kota (urbanisasi) yang mencari pekerjaan pada sektor industri. Analisis ketimpangan spasial ini dianggap penting karena dengan analisis ini dapat diketahui seberapa besar tingkat ketimpangan yang diakibatkan oleh adanya heterogenitas karakteristik suatu wilayah.

Berdasarkan data dan uraian mengenai perkembangan industri manufaktur terhadap ketimpangan spasial di industri manufaktur Provinsi Banten, maka penelitian ini bermaksud untuk menganalisa kondisi tersebut dengan mengambil judul penelitian **“ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN SPASIAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2001-2013”**.

1.2 Rumusan Masalah

Provinsi Banten merupakan daerah hasil pemekaran. Adanya pemekaran pada kabupaten/kota dengan memiliki latar belakang dan kondisi yang berbeda dari segi ekonomi dan non ekonomi dapat mengindikasikan adanya permasalahan pembangunan yang dihadapi adalah ketimpangan spasial antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Banten. Hal ini dikarenakan perbedaan *endowment-factor* dapat membuat jarak antara pembangunan wilayah dengan anugerah yang melimpah dan pembangunan wilayah dengan anugerah yang sedikit.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten selama kurun waktu 13 tahun mengalami pertumbuhan yang positif dan tinggi. Dan PDRB Atas Dasar Harga

Konstan Provinsi Banten memiliki PDRB yang tinggi, akan tetapi PDRB yang tinggi pada Provinsi Banten tidak sejalan dengan PDRB menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Terdapat daerah yang memiliki PDRB yang rendah dan terdapat daerah yang memiliki PDRB yang tinggi.

Berdasarkan Indeks Gini menurut Pulau Jawa tahun 2001-2013 menunjukkan bahwa Provinsi Banten memiliki ketimpangan tertinggi ke dua di Pulau Jawa. Dalam kurun waktu 13 tahun, tingkat ketimpangan di Provinsi Banten yang tercermin dari perkembangan rasio gini yang cenderung meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan positif ternyata tidak serta merta akan menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Permasalahan perbedaan hasil pembangunan, perbedaan karakteristik antar wilayah, dan perbedaan anugerah awal diantara pelaku-pelaku ekonomi mengindikasikan terjadinya masalah yang kompleks yaitu adanya ketimpangan spasial antar daerah.

Dari permasalahan tersebut dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Berapa besar tingkat ketimpangan spasial tahun 2001-2013 di Provinsi Banten?
2. Bagaimana pengklasifikasian kabupaten/kota berdasarkan tipologi klassen tahun 2001-2013 di Provinsi Banten?
3. Bagaimanakah pengaruh investasi, aglomerasi, dan angkatan kerja terhadap ketimpangan spasial pada tahun 2001-2013 di Provinsi Banten?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis besarnya tingkat ketimpangan spasial tahun 2001-2013 di Provinsi Banten,
2. Mengklasifikasikan kabupaten/kota berdasarkan tipologi klassen tahun 2001-2013 di Provinsi Banten,
3. Menganalisis pengaruh investasi, aglomerasi, dan angkatan kerja terhadap ketimpangan spasial pada tahun 2001-2013 di Provinsi Banten.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari peneliitian ini adalah :

1. Dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah provinsi Banten dalam merumuskan kebijakan pembangunan khususnya dibidang industri untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang
2. Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian pada bidang yang sama.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN :

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah dan pembatasannya, tujuan dan manfaat kegiatan, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA :

Pada bab ini berisikan teori-teori yang berhubungan dalam penulisan ini, tinjauan pustaka yang berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, serta hipotesis.

Bab III METODOLOGI PENELITIAN :

Bab ini berisi tentang variabel penelitian dan deskripsi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode mengumpulkan data, serta metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN :

Bab ini berisikan mengenai analisis atau penyelesaian dari data yang ada yang akan dibahas secara terperinci.

BAB V PENUTUP :

Bab ini merupakan penutup yang merangkum dan memberi saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan tema.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

Bab ini akan membahas landasan teori, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis. Pada bagian landasan teori akan berisikan teori-teori yang digunakan, berdasarkan teori dasar yang mendasari. Tinjauan pustaka berisikan penelitian empiris terdahulu dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Kemudian, kerangka pemikiran menjelaskan kembali kerangka pemikiran berdasarkan landasan teori dan tinjauan pustaka dasar yang digunakan penelitian.

2.1 Landasa Teori

2.1.1 Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Regional

Lincoln Arsyad (1997) mengartikan pembangunan ekonomi daerah sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi dengan wilayah tersebut.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembanguan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru (Lincoln Arsyad, 1997).

Pembangunan regional pada dasarnya adalah berkenaan dengan tingkat dan perubahan selama kurun waktu tertentu suatu set variabel-variabel, seperti produksi, penduduk, angkatan kerja, rasio modal tenaga, dan imbalan bagi faktor dalam daerah di batasi secara jelas. Laju pertumbuhan dari daerah-daerah biasanya di ukur menurut output atau tingkat pendapatan.

Pembangunan ekonomi daerah berorientasi pada proses. Suatu proses yang melibatkan pembentukan institusi baru, pembangunan industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, dan transformasi pengetahuan (Adisasmita 2005 dalam Manik, 2009 : 32).

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang terjadi (Tarigan, 2005 : 46). Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya dibuat dalam harga berlaku. Namun agar dapat melihat pertumbuhan dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya, harus dinyatakan dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi), yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi transfer payment, yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah.

Pertumbuhan regional adalah produk dari banyak faktor, sebagian bersifat intern dan sebagian lagi bersifat ekstern dan sosio politik. Faktor-faktor yang berasal dari daerah itu sendiri meliputi distribusi faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal sedangkan salah satu penentu ekstern yang penting adalah tingkat permintaan dari daerah-daerah lain terhadap komoditi yang dihasilkan daerah tersebut, Glasson (1997) menjelaskan bahwa region dapat diklasifikasikan menjadi daerah homogen (*homogeneous region*), daerah administrasi (*administrative region*) dan daerah nodal (*nodal region*).

Pertumbuhan ekonomi daerah yang berbeda-beda intensitasnya akan menyebabkan terjadinya ketimpangan atau disparitas ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar daerah. Myrdal (1968) dan Friedman (1976) menyebutkan bahwa pertumbuhan atau perkembangan daerah akan menuju kepada divergensi. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber-sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya-sumberdaya swasta secara bertanggung jawab. Dalam pembangunan ekonomi daerah diperlukan campur tangan pemerintah. Apabila Pembangunan daerah diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar maka pembangunan dan hasilnya tidak dapat dirasakan oleh seluruh daerah secara merata (Lincoln Arsyad, 1997).

Menurut Arsyad (1997) keadaan sosial ekonomi yang berbeda disetiap daerah akan membawa implikasi bahwa cakupan campur tangan pemerintah untuk tiap daerah berbeda pula. Perbedaan tingkat pembangunan antar daerah, mengakibatkan

perbedaan tingkat kesejahteraan daerah. Memusatnya ekspansi ekonomi di suatu daerah disebabkan berbagai hal, misalnya kondisi dan situasi alamiah yang ada, letak geografis, dan sebagainya.

2.1.2 Ketimpangan Pembangunan Wilayah

2.1.2.1 Definisi Ketimpangan

Mubyarto (1995) membedakan ketimpangan menjadi 3, yaitu:

1. Ketimpangan antar sektor, yaitu sektor industri dan pertanian,
2. Ketimpangan antar daerah, Ketimpangan ini dapat terjadi akibat perbedaan sumberdaya yang dimiliki,
3. Ketimpangan antar golongan ekonomi. Ketimpangan jenis ini adalah yang paling berat. Ketimpangan ini sangat mungkin terjadi di dalam sistem perekonomian yang cenderung liberal atau kapitalis.

Pada aspek makro, Dumairy (1960), menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang layak dikemukakan untuk menerangkan mengapa ketimpangan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat terjadi. Faktor pertama adalah karena ketidaksetaraan anugerah awal diantara pelaku-pelaku ekonomi. Sedangkan faktor kedua karena strategi pembangunan yang tidak tepat dan berorientasi pada pertumbuhan, ketidaksetaraan anugerah awal ini menjadikan adanya kesenjangan.

Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber, berupa akumulasi modal, ketimpangan tenaga kerja, dan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan pemicu dalam laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan

(Riadi, 2007 : 2). Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antar daerah dan antar sektor ekonomi suatu daerah. Bertitik tolak dari kenyataan itu, ketimpangan antar daerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri.

Menurut Myrdal (1957), perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effects*) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga mengakibatkan ketimpangan antar daerah (Arsyad, 1999 dalam Pakpahan, 2009 : 26).

Secara teoritis, permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah mula-mula dimunculkan oleh Douglas C North dalam analisisnya tentang Teori Pertumbuhan Neo-Klasik. Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa ini kemudian lazim dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik (Sjafrizal, 2008).

Menurut Hipotesa Neo-klasik, pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila

proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun (Sjafrizal, 2008).

Myrdal dalam Jhingan (1990), ketimpangan wilayah berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat di wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi, sementara wilayah-wilayah yang lainnya tetap terlantar. Lincoln Arsyad (1997) juga berpendapat perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antar wilayah menyebabkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar wilayah. Ekspansi ekonomi suatu daerah akan mempunyai pengaruh yang merugikan bagi daerah-daerah lain, karena tenaga kerja yang ada, modal, perdagangan akan pindah ke daerah yang melakukan ekspansi tersebut.

Ketimpangan pada kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam pembangunan suatu daerah. Adanya ketimpangan, akan memberikan dorongan kepada daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak jauh tertinggal dengan daerah sekitarnya. Selain itu daerah-daerah tersebut akan bersaing guna meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga ketimpangan dalam hal ini memberikan dampak positif. Akan tetapi ada pula dampak negatif yang ditimbulkan dengan semakin tingginya ketimpangan antar wilayah. Dampak negatif tersebut berupa inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro, 2004).

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengenai ketimpangan wilayah, yaitu:

1. Teori Pusat Pertumbuhan

Pusat pertumbuhan dapat berfungsi secara fungsional dan geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi industri yaitu lokasi konsentrasi kelompok usaha satu cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kegiatan ekonomi baik ke dalam maupun ke luar. Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*) yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi di daerah tersebut, walaupun tidak ada interaksi antar usaha-usaha tersebut (Tarigan, 2004: 115).

Teori Pusat Pertumbuhan (*Growth Poles Theory*) adalah satu teori yang dapat menggabungkan antara prinsip-prinsip konsentrasi dengan desentralisasi secara sekaligus. Dengan demikian teori pusat pengembangan merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pembangunan regional yang saling bertolak belakang, yaitu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ke seluruh pelosok daerah. Selain itu teori ini juga dapat menggabungkan antara kebijaksanaan dan program pembangunan wilayah dan perkotaan terpadu.

Dalam suatu wilayah, ada penduduk atau kegiatan yang terkonsentrasi pada suatu tempat, yang disebut dengan berbagai istilah seperti : kota, pusat perdagangan, pusat industri, pusat pertumbuhan, simpul distribusi, pusat pemukiman, atau daerah modal. Sebaliknya, daerah di luar pusat konsentrasi

dinamakan : daerah pedalaman, wilayah belakang (*hinterland*), daerah pertanian, atau daerah pedesaan.

Keuntungan berlokasi pada tempat konsentrasi atau terjadinya agglomerasi disebabkan faktor skala ekonomi (*economic of scale*) atau *agglomeration (economic of localization)* (Tarigan, 2005 : 159). *Economic of scale* adalah keuntungan karena dalam berproduksi sudah berdasarkan spesialisasi, sehingga produksi menjadi lebih besar dan biaya per unitnya menjadi lebih efisien. *Economic of agglomeration* adalah keuntungan karena di tempat tersebut terdapat berbagai keperluan dan fasilitas yang dapat digunakan untuk memperlancar kegiatan perusahaan, seperti jasa perbankan, asuransi, perbengkelan, perusahaan listrik, perusahaan air bersih, tempat-tempat pelatihan keterampilan, media untuk mengiklankan produk, dan lain sebagainya.

Hubungan antara kota (daerah maju) dengan daerah lain yang lebih terbelakang dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Generatif : hubungan yang saling menguntungkan atau saling mengembangkan antara daerah yang lebih maju dengan daerah yang ada di belakangnya;
2. Parasitif : hubungan yang terjadi dimana daerah kota (daerah yang lebih maju) tidak banyak membantu atau menolong daerah belakangnya, dan bahkan bisa mematikan berbagai usaha yang mulai tumbuh di daerah belakangnya;
3. *Enclave* (tertutup) : dimana daerah kota (daerah yang lebih maju) seakan-akan terpisah sama sekali dengan daerah sekitarnya yang lebih terbelakang,

Pusat pertumbuhan harus memiliki empat ciri, yaitu adanya hubungan *intern* antara berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi, adanya *multiplier effect* (unsur pengganda), adanya konsentrasi geografis, dan bersifat mendorong pertumbuhan daerah belakangnya (Tarigan, 2005 : 162).

Menurut Tarigan (2004: 115) ciri-ciri pusat pertumbuhan adalah :

1. Adanya hubungan internal dari berbagai macam kegiatan

Hubungan internal dimaksudkan sebagai keterkaitan satu sektor dengan sektor lain, sehingga pertumbuhan satu sektor akan mempengaruhi sektor lain. Hal ini akan menciptakan pertumbuhan yang saling melengkapi dan bersinergi untuk saling mendukung terciptanya pertumbuhan.

2. Adanya efek pengganda (*multiplier effect*)

Keberadaan sektor-sektor yang saling terkait dan saling mendukung akan menciptakan efek pengganda. Apabila ada satu sektor atas permintaan dari luar wilayah, produksinya meningkat karena ada keterkaitan membuat produksi sektor lain juga ikut meningkat dan akan terjadi beberapa kali putaran pertumbuhan sehingga total kenaikan produksi bisa beberapa kali lipat dibandingkan dengan kenaikan permintaan dari luar untuk sektor tersebut (sektor yang pertama meningkat permintaannya). Unsur efek pengganda sangat berperan dalam membuat kota itu mampu memacu pertumbuhan belakangnya. Karena kegiatan beberapa sektor di kota meningkat tajam maka kebutuhan kota akan bahan baku atau tenaga kerja yang dipasok dari belakangnya akan meningkat tajam.

3. Adanya konsentrasi geografis

Konsentrasi geografis dari beberapa sektor atau fasilitas, selain bisa menciptakan efisiensi diantara sektor-sektor yang membutuhkan juga meningkatkan daya tarik dari kota tersebut. Orang yang datang ke kota tersebut bisa mendapatkan berbagai kebutuhan pada lokasi yang berdekatan. Jadi, kebutuhan dapat diperoleh dengan lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya. Hal ini membuat kota itu menjadi lebih menarik untuk dikunjungi dan karena volume transaksi yang makin meningkat akan menciptakan *economic of scale* sehingga tercipta efisien lanjutan.

4. Bersifat mendorong daerah belakangnya

Hal ini berarti antara kota dan wilayah belakangnya terdapat hubungan yang harmonis. Kota membutuhkan bahan baku dari wilayah belakangnya dan menyediakan berbagai kebutuhan wilayah belakangnya untuk dapat mengembangkan diri.

Kegiatan ekonomi di suatu wilayah cenderung beraglomerasi di sekitar titik pusat (Adisasmita, 2005: 44). Teori kutub pertumbuhan terutama bersumber pada ahli ekonomi perancis khususnya Perroux yang berpendapat bahwa pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada saat bersamaan, tetapi kehadirannya akan muncul pada beberapa tempat atau pusat pertumbuhan (*growth poles*) dengan intensitas yang berbeda-beda melalui saluran yang berbeda. Ia mengatakan bahwa kota merupakan suatu “tempat sentral” dan sekaligus merupakan kutub pertumbuhan. Pertumbuhan hanya terjadi dibeberapa tempat,

terutama daerah perkotaan, yang disebut pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda.

Perroux mengatakan bahwa industri unggulan merupakan penggerak utama dalam pembangunan daerah, adanya sektor industri unggulan memungkinkan dilakukannya pemusatan industri yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, karena pemusatan industri akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah sehingga perkembangan industri disuatu daerah akan mempengaruhi perkembangan daerah lainnya. Perekonomian merupakan gabungan dari sistem industri yang relatif aktif (industri unggulan) dengan industri-industri yang relatif pasif yaitu industri yang tergantung dari industri unggulan atau pusat pertumbuhan (Arsyad dalam kuncoro, 2002: 29-30).

2. *Backwash – Spread Effect*

Myrdal dalam M,L Jhingan (1993), berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab menyebab sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan semakin banyak, dan mereka yang tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat. Dampak balik (*backwash effect*) cenderung membesar dan dampak sebar (*spread effect*) semakin mengecil. Semakin kumulatif kecenderungan ini semakin memperburuk ketimpangan internasional dan menyebabkan ketimpangan regional di negara-negara terbelakang.

Myrdal (Jhingan, 1993) mendefinisikan dampak balik (*backwash effect*) sebagai semua perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi suatu ekonomi di suatu tempat karena sebab-sebab di luar tempat itu. Dalam istilah ini Myrdal

memasukkan dampak migrasi, perpindahan modal, dan perdagangan serta keseluruhan dampak yang timbul dari proses sebab-musabab sirkuler antara faktor-faktor baik non ekonomi maupun ekonomi. Dampak sebar (*spread effect*) menunjuk pada momentum pembangunan yang menyebar secara sentrifugal dari pusat pengembangan ekonomi ke wilayah-wilayah lainnya. Sebab utama ketimpangan regional menurut Myrdal adalah kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara terbelakang (Jhingan,1993).

Myrdal juga mengemukakan bahwa perpindahan modal juga cenderung meningkatkan ketimpangan wilayah. Di wilayah maju, permintaan yang meningkat akan merangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Lingkup investasi yang lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang (Jhingan, 1993).

Sementara Freedman's (dalam Koncoro,2003) menyatakan bahwa atas dasar kenyataan pada sejarah proses pembangunan spasial menekankan bahwa pembangunan ekonomi mempunyai kecenderungan untuk berkonsentrasi pada suatu daerah yang diawali oleh arus urbanisasi yang kemudian diikuti oleh pembangunan sarana dan prasarana. Perroux (dalam Jhingan,2003) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi yang tidak merata terjadi di berbagai daerah, tetapi mengelompok pada pusat-pusat pertumbuhan dan hal ini akan menentukan perkembangan ekonomi daerah lain yang lebih lambat perkembangannya. Teori Pusat Pengembangan (*Growth Poles Theory*) merupakan salah

satu alat yang ampuh untuk mencapai tujuan pembangunan regional yang saling bertolak belakang yaitu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan keseluruhan pelosok daerah (Sjafrizal, 1997). Teori ini dapat menggabungkan kebijakan dan program pembangunan wilayah dan perkotaan secara terpadu. Hirschman dalam Kuncoro (2003) perbedaan karakteristik alam, sosial, ekonomi, dan sumber daya alam yang penyebarannya berbeda disetiap provinsi. Perbedaan tersebut menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan ekonomi dikarenakan terkonsentrasinya suatu kegiatan perekonomian yang berdampak meningkatnya ekonomi di beberapa provinsi atau wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam yang dimiliki seharusnya dapat menjadikan nilai tambah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Kelebihan yang dimiliki tersebut diharapkan memberikan dampak menyebar (*trickle down effect*). Hanya saja kekayaan alam ini tidak dimiliki oleh seluruh Provinsi di Indonesia secara merata. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya ketimpangan atau kesenjangan antar daerah.

3. *Trickling Down – Polarization Effect*

Albert O Hirschman (1970) membedakan daerah di suatu Negara menjadi daerah kaya dan miskin. Jika perbedaan antar daerah tersebut semakin berkurang berarti efek imbas yang baik (*Trickling Down Effect*). Sedangkan jika perbedaan antara kedua daerah semakin bertambah berarti terjadi proses pengkutuban (*Polarization Effect*).

2.1.2.2 Penyebab Ketimpangan

Adapun faktor-faktor penyebab ketimpangan pembangunan antar wilayah (Manik, 2009 : 23) yaitu :

1. Perbedaan kandungan sumber daya alam

Terdapatnya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumber daya alam pada masing-masing daerah akan mendorong timbulnya ketimpangan antar daerah. Kandungan sumber daya alam seperti minyak, gas alam, atau kesuburan lahan tentunya mempengaruhi proses pembangunan di masing-masing daerah. Demikian pula halnya dengan tingkat kesuburan lahan yang juga sangat bervariasi sehingga mempengaruhi upaya untuk mendorong pembangunan pertanian pada masing-masing daerah. Perbedaan kandungan sumber daya alam ini jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam yang cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya yang relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam yang lebih rendah. Kondisi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan daerah lain.

2. Perbedaan Kondisi Demografi

Faktor utama lain yang juga dapat mendorong terjadinya ketimpangan antar daerah adalah jika terdapat perbedaan kondisi demografi yang cukup besar antar daerah. Kondisi demografi meliputi tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan,

tingkat pendidikan dan kesehatan, kondisi ketenagakerjaan dan tingkah laku masyarakat daerah tersebut.

Perbedaan kondisi demografi ini akan dapat mempengaruhi ketimpangan antar daerah karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografi yang baik akan cenderung memiliki produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Sebaliknya, bila pada suatu daerah tertentu kondisi demografinya kurang baik maka hal ini akan menyebabkan relatif rendahnya produktivitas kerja masyarakat setempat yang menimbulkan kondisi yang kurang menarik bagi penanaman modal sehingga pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan akan menjadi lebih rendah.

3. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Mobilitas barang dan jasa (perdagangan) antar daerah jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Sebagaimana kita ketahui bahwa bila kegiatan perdagangan (baik internasional maupun antar wilayah) kurang lancar maka proses penyamaan harga faktor produksi (*Factor Price Equilization*) akan terganggu. Akibatnya penyebaran proses pembangunan akan terhambat dan ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung menjadi tinggi.

Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Bila mobilitas barang tersebut kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak

dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Demikian pula halnya dengan migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja di suatu daerah yang tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkan. Akibatnya, ketimpangan antar daerah akan cenderung tinggi. Mobilitas barang dan jasa ini mengacu pada penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas-fasilitas di dalam suatu daerah, seperti : jalan, jembatan, alat transportasi baik darat, laut maupun udara dan lain-lain.

4. Perbedaan Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Daerah

Perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah yang cukup tinggi akan cenderung mendorong meningkatnya ketimpangan pembangunan antar daerah karena proses pembangunan daerah akan lebih cepat pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih tinggi. Demikian pula sebaliknya terjadi pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih rendah.

Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Demikian pula, apabila konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah relatif rendah yang selanjutnya juga mendorong terjadinya pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat setempat.

Konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, terdapatnya sumber daya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu,

misalnya minyak bumi, gas, batubara dan bahan mineral lainnya. Terdapatnya lahan yang subur juga turut mempengaruhi, khususnya menyangkut pertumbuhan kegiatan pertanian. Kedua, meratanya fasilitas transportasi, baik darat, laut, dan udara juga ikut mempengaruhi konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah. Ketiga, kondisi demografi (kependudukan) juga ikut mempengaruhi karena kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi dimana sumber daya manusia tersedia dengan kualitas yang lebih baik.

5. Alokasi Dana Pembangunan Antar Daerah

Investasi merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena itu, daerah yang dapat menarik lebih banyak investasi pemerintah dan swasta akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat. Selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui penyediaan tenaga kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Demikian juga sebaliknya terjadi bila investasi pemerintah dan swasta yang masuk ke suatu daerah ternyata lebih rendah.

Alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut. Bila sistem pemerintahan daerah yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan antar daerah cenderung tinggi. Akan tetapi sebaliknya bilamana sistem pemerintahan yang dianut adalah otonomi atau federal, maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pembangunan antar daerah akan cenderung lebih rendah.

Tidak demikian halnya dengan investasi swasta yang lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Dalam hal ini kekuatan yang berperan banyak dalam menarik investasi swasta ke suatu daerah adalah keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah, sedangkan keuntungan lokasi tersebut ditentukan pula oleh ongkos transportasi baik untuk bahan baku dan hasil produksi yang harus dikeluarkan pengusaha, perbedaan upah buruh, konsentrasi pasar, tingkat persaingan usaha dan sewa tanah. Termasuk ke dalam keuntungan lokasi ini adalah keuntungan aglomerasi yang timbul karena terjadinya konsentrasi beberapa kegiatan ekonomi terkait pada suatu daerah tertentu. Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana investasi cenderung lebih banyak terkonsentrasi di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan. Kondisi ini menyebabkan perkotaan cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah pedesaan.

2.1.2.3 Dampak Ketimpangan Pembangunan

Ketimpangan pembangunan telah memberikan berbagai dampak terhadap daerah dan masyarakat. Adapun yang menjadi dampak dari ketimpangan tersebut (www.bappenas.go.id) adalah :

1. Banyak Wilayah-Wilayah yang Masih Tertinggal Dalam Pembangunan

Masyarakat yang berada di wilayah tertinggal pada umumnya masih belum banyak tersentuh oleh program-program pembangunan sehingga akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi dan politik masih sangat terbatas serta terisolir dari wilayah di sekitarnya. Oleh karena itu kesejahteraan kelompok masyarakat yang

hidup di wilayah tertinggal memerlukan perhatian dan keberpihakan pembangunan yang besar dari pemerintah.

2. Belum Berkembangnya Wilayah-Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Banyak wilayah-wilayah yang memiliki produk unggulan dan lokasi strategis belum dikembangkan secara optimal. Hal ini disebabkan, antara lain :

Adanya keterbatasan informasi pasar dan teknologi untuk pengembangan produk unggulan;

1. Belum adanya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari pelaku pengembangan kawasan di daerah;
2. Belum optimalnya dukungan kebijakan nasional dan daerah yang berpihak pada petani dan pelaku swasta;
3. Belum berkembangnya infrastruktur kelembagaan yang berorientasi pada pengelolaan pengembangan usaha yang berkelanjutan dalam perekonomian daerah;
4. Masih lemahnya koordinasi, sinergi dan kerja sama diantara pelaku-pelaku pengembangan kawasan baik pemerintah, swasta, lembaga non pemerintah dan masyarakat serta antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan daya saing produk unggulan;
5. Masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran dalam upaya mengembangkan peluang usaha dan kerja sama investasi;

6. Keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi dalam mendukung pengembangan kawasan dan produk unggulan daerah;
7. Belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerja sama antar wilayah maupun antar negara untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan.

3. Wilayah Perbatasan dan Terpencil Kondisinya Masih Terbelakang

Wilayah perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, serta merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan Negara. Namun demikian, pembangunan di beberapa wilayah perbatasan masih sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan di wilayah negara tetangga. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah ini umumnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi warga negara tetangga. Hal ini mengakibatkan timbulnya berbagai kegiatan ilegal di daerah perbatasan yang dikhawatirkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerawanan sosial.

Permasalahan utama dari ketertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan adalah arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang selama ini cenderung berorientasi "*inward looking*" sehingga seolah-olah kawasan perbatasan hanya menjadi halaman belakang dari pembangunan daerah. Akibatnya, wilayah-wilayah perbatasan dianggap bukan merupakan wilayah prioritas pembangunan oleh pemerintah. Sementara itu daerah-daerah pedalaman yang ada juga sulit berkembang

terutama karena lokasinya sangat terisolir dan sulit dijangkau. Diantaranya banyak yang tidak berpenghuni atau sangat sedikit jumlah penduduknya, serta belum tersentuh oleh pelayanan dasar pemerintah.

4. Kesenjangan Pembangunan Antara Kota dan Desa

Ketimpangan pembangunan mengakibatkan adanya kesenjangan antara daerah perkotaan dengan pedesaan, yang diakibatkan oleh :

1. Investasi ekonomi cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan;
2. Kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan masih banyak yang tidak sinergis dengan kegiatan ekonomi di pedesaan;
3. Peran kota yang diharapkan dapat mendorong perkembangan pedesaan, justru memberikan dampak yang merugikan pertumbuhan pedesaan.

5. Pengangguran, Kemiskinan dan Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Dampak utama dari ketimpangan pembangunan adalah pengangguran, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dampak ini merupakan dampak turunan dari kurangnya lapangan kerja di suatu daerah bersangkutan, yang disebabkan kurangnya investasi baik dari pemerintah maupun swasta, dan mengakibatkan terjadinya pengangguran. Jika pengangguran terjadi maka biasanya disusul terjadinya kemiskinan. Kemiskinan mengakibatkan kualitas sumber daya manusia (generasi berikutnya) cenderung rendah, karena terbatasnya kemampuan untuk menikmati pendidikan akibat rendahnya pendapatan masyarakat bahkan cenderung tidak ada sama sekali, sehingga masyarakat lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan yang paling krusial yaitu makanan dan minuman.

2.1.2.4 Ukuran Ketimpangan Pembangunan

Tingkat ketimpangan wilayah dapat dihitung menggunakan beberapa metode yaitu indeks Williamson, Tipologi Klassen, Indeks Entrophy Theil dan Ketimpangan Berdasarkan Konsep PDRB per Kapita Relatif.

1. Indeks Williamson

Untuk mengetahui tingkat ketimpangan antar wilayah menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional inequality*) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson (Sjafrizal, 2008)

$$IW = \frac{\sqrt{\sum n_{i-1}(Y_i - Y)^2 fi/n}}{Y}$$

Dimana:

Y_i = PDRB per kapita daerah i

Y = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah

f_i = Jumlah penduduk daerah i

n = Jumlah penduduk seluruh daerah

Indeks Williamson berkisar antara $0 < IW < 1$, di mana semakin mendekati nol artinya wilayah tersebut semakin tidak timpang. Sedangkan bila mendekati satu maka semakin timpang wilayah yang diteliti (Sjafrizal, 2008).

2. Tipologi Klasen

Tipologi klasen digunakan untuk mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan dua indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita daerah.

Menurut Tipologi Klassen, perkembangan pembangunan antar daerah kabupaten/kota dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu:

1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*High Growth and High Income*)
2. Daerah maju tetapi tertekan (*High Income but Low Growth*)
3. Daerah berkembang cepat (*High Growth but Low Income*)
4. Daerah relatif tertinggal (*Low Growth and Low Income*)

Tabel 2.1
Tipologi Klassen

Y	$Y_i > Y$	$Y_i < Y$
$r_i > r$	Pendapatan dan pertumbuhan tinggi = daerah maju	Pendapatan rendah, pertumbuhan tinggi = daerah berkembang cepat
$r_i < r$	Pendapatan tinggi dan pertumbuhan rendah = daerah maju tetapi tertekan	Pendapatan rendah, pertumbuhan rendah = daerah tertinggal

Keterangan:

Y = Pendapatan per kapita provinsi

Y_i = Pendapata per kapita daerah kabupaten/kota

r = Pertumbuhan ekonomi provinsi

r_i = Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota

3. Indeks Entropy Theil

Alat analisis ini untuk mengukur ketimpangan regional antar kabupaten dan kota pada sektor manufaktur di Provinsi Banten. Adanya aktivitas perdagangan antar

daerah akan mendorong terjadinya konsentrasi aktivitas industri manufaktur secara geografis (Kuncoro, 2006). Krugman (1991) juga mengemukakan bahwa secara sistematis terjadi pemusatan aktivitas manufaktur secara spasial. Hadirnya spesialisasi dalam aktivitas manufaktur akan membawa dampak pada ketimpangan distribusi aktivitas manufaktur secara spasial.

Kelemahan utama indeks lain yang mengukur konsentrasi atau dispersi secara spasial adalah bahwa mereka hanya menyajikan satu nilai tunggal pada suatu titik waktu. Telah lama diketahui bahwa setiap indeks didesain untuk berbagai tujuan dan berdasarkan beberapa asumsi penting (Hoover, 1936, Isard, 1960, Malecki, 1991). Ellison & Glaeser (1997) menawarkan suatu indeks yang mencoba menangkap lokalisasi *industry-specific spillover* dan keunggulan-keunggulan alami, namun dikiritik karena indeks ini masih tidak dapat secara efektif membedakan antara kedua sumber konsentrasi industri (Kim, 1999: 2-3). Tidak seperti indeks-indeks yang lain, indeks entropy memungkinkan kita untuk membuat perbandingan selama waktu tertentu dan menyediakan secara rinci dalam sub-unit geografis yang lebih kecil.

Indeks entropy menawarkan beberapa kelebihan dibandingkan dengan indeks konsentrasi spasial yang lain. Keunggulan utama indeks ini adalah bahwa pada suatu titik waktu, indeks ini menyediakan ukuran derajat konsentrasi (ataupun dispersi) distribusi spasial pada sejumlah daerah dan sub-daerah dalam suatu Negara. Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa analisis dengan menggunakan indeks entropy telah terbukti amat berguna dalam analisis perubahan pola lokasi industri (Garrison

&Paulson, 1973, Keeble, 1976: 26-9, Semple, 1973) dan sub urbanisasi tenaga kerja di kawasan metropolitan (Carlino, 1998).

Indeks Entropy Theil merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan dan konsentrasi industri yang menawarkan tentang pendapatan regional perkapita dan kesenjangan pendapatan. Untuk mengukur ketimpangan pendapatan regional bruto propinsi menggunakan indeks ketimpangan regional, (Kuncoro, 2002) Indeks ketimpangan regional Theil tersebut dapat dibagi atau diurai menjadi dua sub indikasi yaitu ketimpangan regional dalam wilayah dan ketimpangan regional antar wilayah atau regional (Ying, 2000). Dengan menggunakan alat analisis indeks

$$IET = \sum \left(\frac{Y_{ij}}{Y} \right) + \sum \left(\frac{Y_{ij}}{Y_j} \right) \text{Log} \left(\frac{Y_{ij}}{Y_j} \right)$$

Y_{ij} = Total pendapatan di Kecamatan i, Kabupaten j

Y = Total pendapatan Per Kapita Kabupaten j

Y_{ij} = Rata-rata pendapatan di Kecamatan i, Kabupaten j

Y_j = Pendapatan perkapita Kabupaten j

Didekomposisi berdasarkan pendekatan tipologi klassen :

$$TI = \sum \left(\frac{Y_{ij}}{Y} \right) \text{Log} \left(\frac{Y_{ij}}{Y} \right)$$

Total Theil = Theil *Within* + Theil *between*

Indeks ketimpangan Entropy Theil memungkinkan untuk membuat perbandingan selama waktu tertentu. Indeks ketimpangan Entropy Theil juga dapat

menyediakan secara rinci dalam sub unit geografis yang lebih kecil, yang pertama akan berguna untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu; sedang yang kedua juga penting ketika mengkaji gambaran yang lebih rinci mengenai ketimpangan spasial. Penafsiran indeks ini yaitu bila indeks mendekati 1 artinya sangat timpang dan sebaliknya bila indeks mendekati 0 berarti sangat merata. (Sjafrizal, 2012).

3. Konsep PDRB per Kapita Relatif

Ketimpangan ini diukur menggunakan proksi yang dipakai dalam penelitian Jaime Bonet (2006) yang mendasarkan ukuran ketimpangan wilayah pada konsep PDRB per kapita relatif dengan rumus :

$$RD_{it} = \left| \frac{PDRB \text{ Per Kapita } i, t}{PDRB \text{ Per Kapita Nal, t}} - 1 \right|$$

dimana :

RD = Ketimpangan wilayah Kabupaten/Kota i, tahun t

PDRB per kapita yi, t = PDRB per kapita daerah i pada tahun t

PDB per kapita Nal, t = PDB per kapita Nasional pada tahun t

Rumus tersebut menyatakan bahwa kesetaraan sempurna terjadi pada saat PDRB perkapita wilayah sama dengan PDRB perkapita Banten. Oleh karena itu, ketimpangan wilayah diukur dari selisih antara PDRB per kapita relative (wilayah terhadap nasional). Nilai PDRB Per Kapita relative yang semakin tinggi menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin besar, sementara apabila nilai PDRB Per Kapita Relative semakin kecil mendekati 0 menunjukkan tingkat pemerataan.

2.1.3 Investasi

2.1.3.1 Teori Investasi

Sedangkan menurut Sadono Sukirno (2005), teori ekonomi mendefinisikan investasi sebagai : pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Ketika pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi tersebut diperkirakan akan mendatangkan keuntungan berupa hasil penjualan yang lebih besar dari pengeluaran yang untuk investasi, maka investor akan memutuskan untuk melakukan investasi atau penanaman modal.

Dalam praktiknya, dalam usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam suatu tahun tertentu, yang digolongkan sebagai investasi (atau pembentukan modal atau penanaman modal) meliputi pengeluaran-pengeluaran yang berikut:

1. Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan,
2. Pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangun kantor, bangunan pabrik dan bangunan-bangunan lainnya,
3. Pertambahan nilai stok-stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional.

Jumlah dari ketiga jenis komponen investasi tersebut dinamakan investasi bruto, yaitu yang meliputi investasi untuk menambah kemampuan memproduksi dalam perekonomian dan mengganti barang modal yang telah didepresiasi. Apabila investasi bruto dikurangi oleh nilai depresiasi maka akan didapat investasi netto.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adapun tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain adalah untuk :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi. Pengaliran iklim investasi di Indonesia dijamin keberadaannya dengan adanya Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Definisi Penanaman Modal Asing (PMA) antara lain sebagai alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah

digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia. Sedangkan definisi penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara RI yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Investasi pada hakekatnya merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi. Investasi dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah atau kerjasama antara pemerintah dan swasta. Investasi merupakan suatu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk jangka panjang dapat menaikkan standar hidup masyarakatnya (Mankiw, 2003). Dengan semakin besarnya investasi pemerintah pada barang publik maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumberdaya yang ada di suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB.

2.1.3.2 Hubungan antara Investasi dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Investasi berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal ini digambarkan dengan semakin banyaknya investasi yang masuk kedalam suatu wilayah akan meningkatkan output yang dihasilkan dan berakhir pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi semakin banyaknya investasi yang masuk ke suatu wilayah justru akan menyebabkan ketidakmerataan. Menurut Myrdal (Jhingan, 1993), investasi cenderung menambah ketidakmerataan. Di daerah-daerah yang sedang berkembang, permintaan barang dan jasa akan mendorong naiknya investasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Sebaliknya di daerah-daerah yang kurang berkembang, permintaan akan investasi rendah karena

pendapatan masyarakat yang rendah. Selain itu Investasi khususnya investasi swasta lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Dalam hal ini, kekuatan yang berperan banyak dalam menarik investasi swasta ke suatu daerah adalah keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah (Sjafrizal, 2008). Perbedaan inilah yang akan menyebabkan ketimpangan antar wilayah menjadi semakin lebar.

2.1.4 Aglomerasi

Istilah aglomerasi pada dasarnya berawal dari ide Marshall tentang penghematan aglomerasi (*agglomeration economies*) atau disebut sebagai industri yang terlokalisir (*localized industries*). Menurut Montgomery dalam Kuncoro (2002:24), aglomerasi adalah konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan karena penghematan akibat lokasi yang berdekatan (*economies of proximity*) yang diasosiasikan dengan kluster spasial dari perusahaan, para pekerja dan konsumen.

Sementara Markusen menyatakan bahwa aglomerasi merupakan suatu lokasi yang “tidak mudah berubah” akibat adanya penghematan eksternal yang terbuka bagi semua perusahaan yang letaknya berdekatan dengan perusahaan lain dan penyedia jasa-jasa, dan bukan akibat kalkulasi perusahaan atau para pekerja secara individual (Kuncoro, 2002: 24).

Menurut Robinson Tarigan (2007), keuntungan berlokasi pada tempat konsentrasi atau terjadinya aglomerasi disebabkan faktor skala ekonomi (*economic of scale*) dan *economic of agglomeration*, *economic of scale* adalah keuntungan karena

dapat berproduksi berdasarkan spesialisasi sehingga produksi lebih besar dan biaya per unit lebih efisien. Sedangkan *economic of agglomeration* ialah keuntungan karena di tempat itu terdapat berbagai keperluan dan fasilitas yang dapat digunakan oleh perusahaan. Konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah yang cukup tinggi akan cenderung mendorong meningkatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah sebab proses pembangunan daerah akan lebih cepat pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih tinggi. Sedangkan konsentrasi kegiatan ekonomi rendah proses pembangunan akan berjalan lebih lambat. Oleh karena itu, ketidakmerataan ini menimbulkan ketimpangan pembangunan antar wilayah (Sjafrizal, 2008).

Myrdal dan Pred (dalam Mudrajad Kuncoro, 2002) berpendapat bahwa dampak positif dari kausalitas kumulatif disebut *agglomeration economies* seperti terbentuknya industri baru, penciptaan kesempatan kerja lebih lanjut, peningkatan daya tarik kerja dan modal, peningkatan ketrampilan penduduk pengembangan industri terkait, perluasan jasa-jasa lokal dengan biaya per unit yang lebih rendah, dan tersedianya jasa dan hiburan yang baik. Pada saat aglomerasi di suatu wilayah mampu mencapai skala ekonomis yang maksimum, maka ekspansi setelah titik tersebut hanya akan menimbulkan dampak negative (*agglomeration diseconomies*) bagi wilayah aglomerasi. Adanya persaingan antar perusahaan dan industri, lama kelamaan akan meningkatkan harga bahan baku dan faktor produksi sehingga biaya per unit naik yang akan menyebabkan relokasi aktivitas ekonomi ke daerah lain yang belum mencapai skala produksi maksimum. Munculnya *agglomeration economies* di suatu

wilayah akan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut karena terciptanya efisiensi produksi (Richardson, dalam J, Sigalingging, 2008).

Aglomerasi dapat diukur dengan beberapa cara :

1. Menggunakan proporsi jumlah penduduk perkotaan (*urban area*) dalam suatu propinsi terhadap jumlah penduduk tersebut,
2. Menggunakan konsep aglomerasi produksi (Bonet dalam Atur J, Sigalingging, 2008) yaitu menggunakan proporsi PDRB kabupaten/ kota terhadap PDRB propinsi (dalam suatu proporsi)
3. Menggunakan konsep proporsi jumlah tenaga kerja sektor industri di kabupaten/ kota terhadap jumlah tenaga kerja sektor industri dalam suatu propinsi.

Menurut Sbergami (2002) ketiga konsep tersebut adalah proksi dari aglomerasi yang disebut dengan Indeks Balassa (*Balassa Indeks*).

2.1.4.2 Hubungan antara Aglomerasi dan Ketimpangan Spasial

Menurut Syafrizal (2008) terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi akan mendorong terjadinya ketimpangan antar wilayah. Konsentrasi ini tercermin dalam kegiatan aglomerasi. Pertumbuhan ekonomi daerah dengan konsentrasi ekonomi yang lebih tinggi akan lebih cepat merangsang pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat. Hal yang sebaliknya juga berlaku, bilamana konsentrasi ekonomi suatu daerah rendah maka akan mendorong terjadinya pengangguran dan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah.

2.1.5 Pengeluaran Pemerintah

Pembangunan ekonomi pada dasarnya adalah upaya untuk memperluas kemampuan dan kebebasan memilih. Terciptanya pembangunan ekonomi sangat tergantung dari peran pemerintah yang antara lain dimanifestasikan lewat pengeluaran pemerintah. Teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi pada prinsipnya dapat digolongkan menjadi tiga golongan (Mangkoesobroto, 2008), yaitu:

1. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran daerah

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi sangat besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun peranan investasi swasta sudah semakin besar. Meskipun demikian, peranan pemerintah tetap besar pada tahap ini karena peranan swasta yang semakin besar akan menimbulkan banyak kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa public dalam jumlah yang lebih banyak. Selain itu pada tahap menengah, perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor

ekonomi yang makin kompleks, sehingga pemerintah harus turun tangan untuk melindungi penduduk dari eksternalitas negatif suatu sektor dan melindungi buruh dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Musgrave juga berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, persentase investasi swasta terhadap PDB akan semakin besar dan sebaliknya persentase investasi pemerintah terhadap PDB akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan prasarana kepada pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan pelayanan kesehatan masyarakat.

2. Hukum Wagner

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan persentase pengeluaran pemerintah terhadap PDB yang semakin besar, yaitu dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hukum Wagner dikenal dengan “The Law of Expanding State Expenditure”. Dasar dari hukum tersebut adalah pengamatan empiris terhadap negara-negara maju. Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat. Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang public. Wagner hanya mendasarkan pandangannya dengan

suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah (organic theory of the state) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lain.

3. Teori Peacock and Wiseman

Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.

Teori Peacock dan Wiseman adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi (PDB) menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Peningkatan

PDB dalam keadaan normal menyebabkan penerimaan pemerintah menjadi semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Apabila dalam keadaan normal tersebut terganggu, misalnya karena perang, maka pemerintah harus memperbesar penerimaannya untuk membiayai perang.

Satu hal yang perlu dicatat dari teori Peacock dan Wiseman adalah bahwa mereka mengemukakan adanya toleransi pajak, yaitu suatu limit perpajakan, akan tetapi mereka tidak menyatakan pada tingkat berapa toleransi pajak tersebut. Clarke menyatakan bahwa limit perpajakan adalah sebesar 25 persen dari pendapatan nasional. Apabila limit dilampaui maka akan terjadi inflasi dan gangguan lainnya.

2.1.5.1 Pengeluaran Pemerintah Daerah

Pengeluaran pemerintah di Indonesia selain menjadi sumber pembiayaan bagi program-program sosial, juga berperan besar dalam meningkatkan dan mempertahankan permintaan agregat serta pertumbuhan ekonomi. Sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut berasal dari penerimaan dalam negeri dan hibah. Sedangkan pengeluaran pemerintah daerah dibiayai oleh pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Menurut fungsi pemerintahan, pengeluaran pemerintah daerah terdiri dari belanja untuk fungsi pelayanan umum, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi pendidikan dan belanja untuk fungsi

perlindungan sosial. Sedangkan menurut jenis kegiatan berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 50, pengeluaran pemerintah daerah dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Belanja langsung

Belanja langsung adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya dan kegiatan yang direncanakan. Jenis belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja barang modal. Keberadaan anggaran belanja langsung merupakan konsekuensi karena adanya program atau kegiatan. Karakteristik belanja langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan. Variabelitas jumlah komponen belanja langsung sebagian besar dipengaruhi oleh target kinerja atau tingkat pencapaian program atau kegiatan yang diharapkan.

2. Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Jenis belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Keberadaan belanja tidak langsung bukan merupakan konsekuensi dari ada atau tidaknya suatu program atau kegiatan. Belanja tidak langsung digunakan secara periodik dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah yang bersifat umum.

2.1.5.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Ketimpangan Pembangunan

Peranan pemerintah yang tercermin melalui pengeluaran pemerintah merupakan faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat. Semakin besar pengeluaran pemerintah akan berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Adanya pengeluaran pemerintah akan dapat mendorong perekonomian melalui program-program yang mampu meningkatkan produktivitas suatu wilayah.

2.1.6 Angkatan Kerja

Besarnya penyediaan atau supply terhadap faktor produksi tenaga kerja dalam masyarakat merupakan jumlah orang yang menawarkan jasanya untuk kegiatan memproduksi barang dan jasa. Penduduk adalah sumber penawaran tenaga kerja. Kelahiran akan menyebabkan penambahan penduduk, termasuk jumlah angkatan kerja, mortalitas menyebabkan berkurangnya jumlah angkatan kerja.

Keadaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat cenderung dipengaruhi oleh besarnya jumlah orang yang mempunyai penghasilan. Besarnya penghasilan tergantung dari kualifikasi tenaga kerja (seperti pendidikan, keterampilan, keahlian) dari pekerja.

Di Indonesia batasan umur minimum tenaga kerja adalah 15 tahun yang diberlakukan setelah mulai tanggal 1 Oktober 1998 berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 yang disesuaikan dengan ketentuan internasional. Pemberlakuan UU ini dikarenakan pada awal pengaturan umur minimum tenaga kerja berada pada 10

tahun atau lebih. Apabila definisi tenaga kerja adalah penduduk berumur 10 tahun atau lebih maka banyak jumlah penduduk dalam usia sekolah yang bekerja. Pemberlakuan wajib belajar 9 tahun dipilih agar anak-anak umur sampai 14 tahun akan berada di sekolah. Hal ini lah yang menjadi dasar perubahan umur minimum tenaga kerja.

Besarnya penyediaan atau supply terhadap faktor produksi tenaga kerja dalam masyarakat merupakan jumlah orang yang menawarkan jasanya untuk kegiatan memproduksi barang dan jasa. Angkatan kerja adalah golongan tenaga kerja yang terdiri dari mereka yang bekerja dan menganggur dan mencari kerja. Menurut J. Simanjuntak (1998), golongan yang bekerja adalah mereka yang sudah aktif dalam kegiatannya yang menghasilkan barang dan jasa, sedangkan sebagian lain tergolong yang siap bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan dinamakan pencari kerja atau menganggur.

Gambar 2.1
Penduduk dan Tenaga Kerja



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dalam hubungannya dengan pertumbuhan PDRB per kapita, P. Todaro (2000) menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja (yang terjadi beberapa tahun kemudian setelah pertumbuhan penduduk) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor yang memacu pertumbuhan ekonomi.

Dalam Raharjo (2006) menyebutkan dalam model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya pengertian tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang bersifat *homogeny*. Menurut Lewis, angkatan kerja yang *homogeny* dan tidak terampil dianggap bisa bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancar dan dalam jumlah tidak terbatas. Pada keadaan seperti itu, peranan tenaga kerja mengandung sifat elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja (dari sektor tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern. Dengan demikian salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja.

Menurut Nicholson bahwa suatu fungsi produksi pada barang atau jasa proses yang dilakukan oleh perusahaan berupa kegiatan mengkombinasikan input (sumber daya) untuk menghasilkan output. Dengan kata lain produksi merupakan proses perubahan dari input menjadu output, Fungsi produksi dinyatakan:

$$Q = f(K, L)$$

Dimana, Q adalah output, K adalah Kapital (modal), dan L adalah tenaga kerja. Persamaan tersebut merupakan gambaran sederhana dan bersifat umum mengenai keterkaitan antar faktor-faktor produksi dan jumlah produksi. Persamaan

tersebut menggambarkan bahwa tingkat produksi suatu barang tergantung pada jumlah modal dan tenaga kerja. Apabila salah satu masukan ditambah satu unit tambahan dan masukan lainnya dianggap tetap maka akan menyebabkan tambahan keluaran yang dapat diproduksi. Dengan kata lain apabila jumlah tenaga kerja ditambah sedangkan faktor produksi lain konstan, maka pada awalnya akan menunjukkan peningkatan output, namun pada suatu tingkat tertentu akan memperlihatkan penurunan output serta setelah mencapai tingkat keluaran maksimum setiap penambahan tenaga kerja akan mengurangi keluaran.

Jumlah angkatan kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya. Dengan kata lain, semakin banyak angkatan kerja yang digunakan dalam proses produksi maka output hasil produksi akan mengalami peningkatan sampai batas tertentu. Faktor penghambat peningkatan kesejahteraan adalah tingkat pertumbuhan kesempatan kerja lebih kecil dibandingkan pertumbuhan Angkatan kerja.

2.1.6.1 Hubungan antara Angkatan Kerja dan Ketimpangan Spasial

Angkatan kerja merupakan salah satu faktor pendukung terciptanya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Angkatan kerja adalah bagian penting dalam ketenagakerjaan yang harus memperoleh perhatian yang lebih. Mengatasi permasalahan angkatan kerja yang mengalami peningkatan harus disikapi dengan penciptaan lapangan kerja yang luas dan mampu menampung kelebihan angkatan kerja. Ketidakmampuan suatu daerah dalam menciptakan lapangan pekerjaan akan

menyebabkan angkatan kerja yang berpotensi akan lebih memilih untuk pindah ke daerah yang memiliki banyak lapangan pekerjaan dan mengindikasikan adanya ketimpangan apabila hal tersebut tidak dapat tercapai.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan dibahas penelitian empiris yang telah dilakukan diberbagai daerah Indonesia mengenai ketimpangan spasial.

Dalam penelitian Kusmantoro, Disparitas dan Spesialisasi Industri Manufaktur Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah. Penelitian ini mencoba mengamati adanya heterogenitas dan keberagaman karakteristik suatu wilayah yang menyebabkan kecendrungan terjadinya ketimpangan antar daerah dan antar sektor ekonomi. Hal ini terjadi dikarenakan perbedaan sumber daya yang dimiliki antar daerah. Peningkatan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dijalankan dengan berspesialisasi pada produk yang memiliki permintaan yang tinggi. Penelitian ini menggunakan Indeks ketimpangan regional (indeks Theil), indeks spesialisasi regional. Hasil penelitian ini menyebutkan Disparitas industri manufaktur besar dan sedang pada kabupaten atau kota di Jawa Tengah menunjukkan ketidakmerataan baik dilihat grafis maupun dalam indeks Theil. Hasil identifikasi spesialisasi industri pada kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa aktivitas industri yang menonjol adalah industri makanan, minuman, industri tekstil, industri kayu, barang-barang dari kayu dan anyaman serta industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia.

Zainal arifin, *Dinamika Spasial Industri Manufaktur di Jawa Barat, Tahun 1990-1999*. Penelitian ini mencoba mengamati konsentrasi daerah industri di Jawa Barat dan mengamati faktor-faktor penentu konsentrasi spasial industri manufaktur besar dan sedang di Jawa Barat serta analisis konvergensi guna mengetahui apakah telah terjadi penurunan disparitas antar daerah dalam pertumbuhan industri manufaktur. Dari perhitungan dengan analisis deskriptif memperlihatkan betapa distribusi tenaga kerja untuk seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat memiliki kecondongan positif yang mengindikasikan bahwa ada beberapa kabupaten dan kota yang menunjukkan tingkat kepadatan industrial yang tinggi dilihat dari sudut jumlah tenaga kerja dan nilai tambah yang dihasilkan, sementara sebagian besar justru memiliki tingkat kepadatan industri yang rendah.

Adapun pada penelitian Kuncoro (2002), melakukan studi tentang dinamika spasial industri manufaktur di Indonesia dengan tahun pengamatan 1976 sampai 1999. Studi ini menegaskan bahwa aglomerasi industri besar dan sedang sangat berhubungan dengan konsentrasi perkotaan di Jawa. Aglomerasi industri manufaktur dan populasi yang besar telah berkembang di Jabotabek dan Greater Bandung di bagian barat, dan Greater Surabaya di bagian timur pulau Jawa. Daerah-daerah tersebut menawarkan daya aglomerasi yang kuat, yang pada akhirnya akan menarik baik orang maupun perusahaan-perusahaan.

Dhyatmika (2013) melakukan penelitian mengenai Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Indeks Williamson untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar

daerah. Tipologi Klassen untuk mengelompokan tiap-tiap daerah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita. Analisis panel data dengan metode Fixed Effect Model dengan waktu penelitian 2001-2011. Hasil analisis data panel dengan metode FEM, penanaman modal asing (PMA) berpengaruh positif dan pengeluaran pemerintah (GE) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan, sedangkan variabel tingkat pengangguran (UE) tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten pasca pemekaran wilayah. Hasil penelitian diketahui bahwa Ketimpangan yang terjadi di Provinsi Banten dan kabupaten/kota yang berada didalamnya ini disebabkan karena perbedaan karakteristik wilayah-wilayah tersebut.

Resti Sandy Tias pada tahun 2014 melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penanaman Modal Asing dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Banten Tahun 2008-2012”. Variabel dependen yang digunakan adalah ketimpangan pembangunan ekonomi, dan variabel independen yang digunakan adalah Penanaman Modal Asing. Pengeluaran Pemerintah menghasilkan kesimpulan Penanaman modal asing memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah hubungan negatif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah hubungan negatif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Secara bersamaan (simultan) menunjukkan bahwa kedua variabel bebas yaitu penanaman modal asing dan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap variabel terikat yakni ketimpangan pembangunan ekonomi. Berdasarkan uji koefisien determinasi dapat

disimpulkan bahwa kontribusi yang diberikan oleh penanaman modal asing dan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi sebesar 47,91%. Artinya masih ada faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan ekonomi sebesar 52,09%.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wisnu Ari Wibowo (2013) mengenai Pengaruh Faktor Aglomerasi Industri, Angkatan Kerja Dan Tingkat Upah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2010. Penelitian menunjukkan hanya daerah tertentu saja yang terdapat aglomerasi industri sedang dan ada beberapa daerah yang beraglomerasi kecil. Kesimpulan penelitian ini adalah ada pengaruh antara aglomerasi industri, angkatan kerja dan tingkat upah terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

Yuki Angelia pada tahun 2012 melakukan penelitian dengan judul “Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1995-2008”. Variabel dependen yang digunakan adalah Ketimpangan Wilayah, dan variabel independen yang digunakan adalah PDRB Per Kapita, Investasi, Aglomerasi, *Dummy* Desentralisasi fiskal. Hasil penelitian menunjukkan tingkat ketimpangan yang cenderung meningkat dan tinggi selama periode penelitian. Hasil penelitian PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah, ini dikarenakan kenaikan pendapatan per kapita di Provinsi DKI Jakarta tidak terjadi secara merata pada seluruh penduduk. Aglomerasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah, hal ini dikarenakan kegiatan ekonomi hanya terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu saja sehingga wilayah lain tetap terbelakang. Dari hasil penelitian

ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat ketimpangan regional sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Benedictus (2012) yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, *Share* Sektor Industri dan Pertanian serta jumlah orang yang bekerja terhadap ketimpangan wilayah antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2002-2010. Penelitian ini menganalisis permasalahan ketimpangan yang terjadi di Jawa Tengah berdasarkan pertumbuhan ekonomi, perbedaan nilai output per tenaga kerja secara sektoral yang dimiliki tiap kabupaten/kota yang disebabkan oleh perbedaan kemampuan antara pekerja sektor industri dan pertanian dan jumlah tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan analisis regresi panel data dengan pendekatan Model *Fixed Effect*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingkat ketimpangan antar wilayah masih cukup tinggi yaitu sebesar 0,6. Hipotesis Kuznets terbukti pada provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil regresi, variabel kontribusi sektor pertanian dan industri pengolahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan. Variabel tingkat jumlah orang yang bekerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan.

Nobuo Akai dan Mayaso Sakata (2005) melakukan penelitian untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan ekonomi. Penelitian ini berjudul "*Fiscal Decentralization Commitment and Regional Inequality: Evidence From State Level Cross-Sectional Data for the United States*". Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan analisis dengan regresi panel data. Variabel yang

digunakan dalam penelitian ini adalah Desentralisasi, GDP Per Kapita, panjang jalan, tingkat metropolitan, tingkat pendidikan, manufaktur, efek politik, investasi, tingkat pengangguran, dan populasi. Hasil estimasi dari regresi data panel menunjukkan bahwa variabel desentralisasi, GDP per kapita dan tingkat pengangguran signifikan dan berpengaruh positif terhadap ketimpangan. Variabel panjang jalan, tingkat metropolitan, tingkat pendidikan, manufaktur, dan investasi berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap ketimpangan.

Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Judul dan Nama Penulis	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
<i>Disparitas Dan Spesialisasi Industri Manufaktur Kabupaten / Kota Di Jawa Tengah</i> Kusmanto (2009)	Tenaga kerja, jumlah perusahaan Industri manufaktur, Industri manufaktur besar dan sedang, dan nilai tambah,	Indeks ketimpangan Williamson, indeks ketimpangan entropy theil dan Analisis LQ	Disparitas industri manufaktur besar dan sedang pada kabupaten/kota di Jawa Tengah menunjukkan ketidakmerataan baik dilihat dari grafis maupun dengan indeks Theil, Spesialisasi industri di daerah industri yang lokasinya berdekatan mempunyai kesamaan spesialisasi,
<i>Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran</i>	Ketimpangan pembangunan wilayah (Y) Investasi Asing (X1) Pengeluaran Pemerintah	Analisis ketimpangan (Indeks Wiliamson) Tipologi klassen, Analisis panel data dengan	Menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten cenderung meningkat, Berdasarkan tipologi

Ketut Wahyu Dhyatmika	(X2) dan tingkat pengangguran (X3)	metode <i>Fixed Effect Model</i>	<p>kelas, Kota Tangerang dan Cilegon berada pada kelompok daerah maju dan cepat berkembang, Kabupaten Tangerang pada kelompok daerah berkembang cepat dan daerah lainnya berada pada kategori daerah tertinggal, Hasil analisis data panel dengan metode FEM, penanaman modal asing (PMA) berpengaruh positif dan pengeluaran pemerintah (GE) berpengaruh terhadap ketimpangan, sedangkan Variable tingkat pengangguran (UE) tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten pasca pemekaran wilayah,</p>
-----------------------	------------------------------------	----------------------------------	---

<p>Pengaruh Penanaman Modal Asing dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Banten Tahun 2008-2012</p> <p>Resti Sandy Tias (2013)</p>	<p>Ketimpangan Pembangunan Ekonomi (Y)</p> <p>PMA (X1)</p> <p>Pengeluaran Pemerintah (X2)</p>	<p>Indeks Wiliamson, Tipologi Klasen, dan Analisis Regresi Berganda (<i>Random Effect Model</i>)</p>	<p>Penanaman modal asing memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah hubungan negatve terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi,</p> <p>Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah hubungan negatif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi,</p> <p>Secara bersama-sama menunjukkan bahwa kedua variabel bebas berpengaruh degati terhadap variabel terikat,</p>
<p>Pengaruh Faktor Aglomerasi Industri, Angkatan Kerja Dan Tingkat Upah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>Pertumbuhan ekonomi (Y)</p> <p>Aglomerasi (X1)</p> <p>Angkatan kerja (X2)</p> <p>Tingkata upah (X3)</p>	<p>Analisis regresi data panel dengan Program Eviews</p>	<p>Ada pengaruh antara antara aglomerasi industri, angkatan kerja dan tingkat upah terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah,</p> <p>Aglomerasi industri berpengaruh</p>

Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2010 Wisnu Ari Wibowo			positif dan signifikan, Angkatan kerja, paling berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, Tingkat Upah, berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah
Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1995-2008 Oleh Yuki Angelia	Ketimpangan Wilayah (Y) PDRB Per Kapita (X1) Investasi (X2) Aglomerasi (X3) <i>Dummy</i> Desentralisasi Fiskal (X4)	Analisis statistik deskriptif dan Analisis regresi dengan metode <i>Ordinary Least Square</i> (OLS)	Hasil penelitian PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah, Aglomerasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah, Dari hasil penelitian ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat ketimpangan regional sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal,
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Share Sektor	Ketimpangan Pembangunan Wilayah (Y)	Analisis Statistik Deskriptif, korelasi	Tingkat ketimpangan wilayah di Jawa Tengah selama periode

<p>Industri Dan Pertanian Serta Jumlah Orang Yang bekerja Terhadap Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2002-2010 Oleh Benedictus Riandoko Adi Kurniawan</p>	<p>Pertumbuhan Ekonomi (X1), Nilai Share Sektor Pertanian (X2), Nilai Sektor Industri (X3), dan Tingkat Jumlah Tenaga Kerja (X4)</p>	<p>pearson, dan analisis Regresi Model <i>Fixed Effect</i></p>	<p>penelitian mengalami peningkatan, Dari hasil regresi , pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif, Variabel share sektor pertanian berpengaruh secara positif, Variabel share sektor industri berpengaruh positif, Variabel tingkat jumlah orang bekerja berpengaruh negatif,</p>
<p><i>fiscal decentralization commitment and regional inequality</i> Nobuo Akai dan Mayaso Sakata</p>	<p>Desentralisasi, GDP Per Kapita, Panjang Jalan, Tingkat metropolitan, tingkat pendidikan, manufaktur, efek politik, investasi, tingkat pengangguran, populasi</p>	<p>Regresi Panel Data dengan pendekatan <i>Fixed Effect Model</i></p>	<p>Variabel Desentralisasi, GDP per kapita dan tingkat pengangguran signifikan dan berpengaruh positif dengan ketimpangan, Sedangkan variabel panjang jalan, tingkat metropolitan, pendidikan, manufaktur dan investasi signifikan dan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan,</p>

2.3 Kerangka Pemikiran

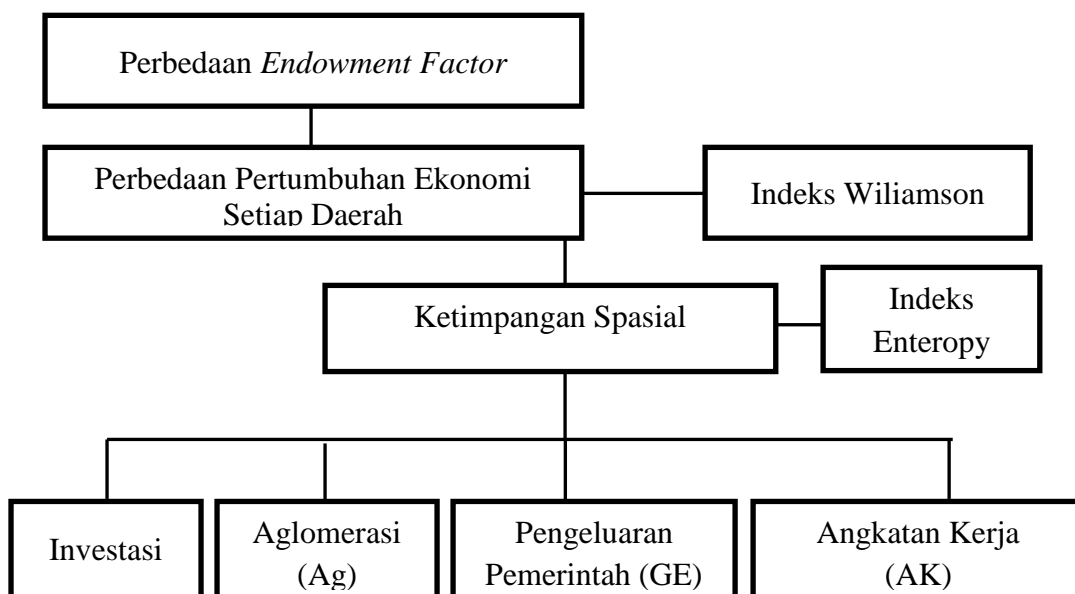
Pertumbuhan ekonomi daerah yang berbeda-beda intensitasnya, ketidaksetaraan anugerah awal diantara pelaku-pelaku ekonomi dan beragamnya karakteristik suatu wilayah akan menyebabkan terjadinya ketimpangan spasial. Perbedaan *endowment-factor* dapat membuat jarak antara pembangunan wilayah dengan anugerah yang melimpah dan pembangunan wilayah dengan anugerah yang sedikit. Perbedaan ini menimbulkan permasalahan pertumbuhan ekonomi setiap daerah, dikarenakan ketidaksetaraan anugerah awal diantara pelaku-pelaku ekonomi dan beragamnya karakteristik.

Ketimpangan spasial pada kabupaten/kota di Provinsi Banten ini dapat dipengaruhi oleh investasi, aglomerasi, pengeluaran pemerintah, dan angkatan kerja. Permasalahan investasi dapat muncul ketika kecendrungan investor lebih memilih menanamkan modalnya pada wilayah memiliki keuntungan lokasi, dan memiliki kelengkapan sarana dan prasarana. Permasalahan aglomerasi dapat terjadi ketika keuntungan lokasi yaitu yang timbul karena terjadinya konsentrasi beberapa kegiatan ekonomi terkait pada suatu daerah tertentu. Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana investasi cenderung lebih banyak terkonsentrasi di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan. Kondisi ini menyebabkan perkotaan cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah pedesaan. Permasalahan angkatan kerja dapat terjadi ketika suatu daerah yang memiliki konsentrasi tinggi akibat dari adanya aglomerasi yang menyebabkan angkatan kerja lebih tertarik untuk bermigrasi ke daerah yang memiliki konsentrasi yang tinggi dikarenakan daerah tersebut memiliki banyak

lapangan kerja dan memiliki upah yang lebih tinggi dibandingkan daerah asalnya. Pemerintah Daerah memegang peran penting dalam mengatur perekonomian daerah dalam pengeluaran pemerintahnya yang dapat mendorong perekonomian. Besarnya pengeluaran pemerintah sangat mempengaruhi kemampuan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.

Dalam penelitian ini untuk mengukur ketimpangan spasial Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2001-2013 menggunakan Indeks Williamson (IW) dan Indeks Entropi Theil, dengan besaran nilai antara 0-1. Semakin besar IW maka semakin besar ketimpangan, sebaliknya jika IW semakin kecil (mendekati 0) maka semakin merata. Nilai $IW < 0,3$ berarti disparitas pendapatan yang terjadi tergolong rendah, IW antara 0,3 – 0,5 termasuk kategori sedang, kemudian dikatakan tinggi jika $IW > 0,5$. Sedangkan, Indeks Entropi Theil bila indeks mendekati 1 artinya sangat timpang dan sebaliknya bila indeks mendekati 0 berarti sangat merata.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Berdasarkan teori dan hubungan antara tujuan penelitian, kerangka pemikiran terhadap rumusan masalah, maka hipotesis atau jawaban sementara dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Diduga terdapat hubungan positif antara investasi dengan ketimpangan spasial,
- b. Diduga terdapat hubungan positif antara Aglomerasi dengan ketimpangan spasial,
- c. Diduga terdapat hubungan negatif antara pengeluaran pemerintah dengan ketimpangan spasial.
- d. Diduga terdapat hubungan negatif antara angkatan kerja dengan ketimpangan spasial.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat 2 tipe variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen diartikan sebagai variabel yang dipengaruhi atau di jelaskan oleh variabel independen (bebas). Sedangkan variabel independen dijelaskan sebagai variabel yang mempengaruhi atau menjelaskan terhadap variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini variabel yang dijadikan sebagai variabel dependen adalah tingkat ketimpangan (ET), sedangkan yang dipilih menjadi variabel independen adalah Investasi (I), Aglomerasi (AG), dan Angkatan Kerja (AK), Selanjutnya akan dijelaskan definisi dan indikator tiap variabel dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Variabel Ketimpangan Spasial (ET)

Ketimpangan Spasial antar kabupaten dan kota pada sektor manufaktur di Provinsi Banten yang diakibatkan perbedaan sumber daya yang dimiliki dan dihitung dengan menggunakan Indeks Theil.

2. Investasi (I)

Investasi diperoleh dari jumlah realisasi investasi dalam negeri (Penanaman Modal Dalam Negeri) ditambah dengan realisasi investasi asing (Penanaman Modal Asing).

Data Investasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi PMA ditambah PMDN yang ditanam oleh badan usaha atau perseorangan ke Provinsi Banten dari tahun 2001-2013.

Dikarenakan data yang tersaji tidak lengkap atau terdapat beberapa tahun yang berisikan angka nol, maka dilakukan interpolasi. Interpolasi adalah suatu cara untuk mencari nilai diantara beberapa titik data yang telah diketahui. Data realisasi bersumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan satuan rupiah.

3. Aglomerasi (AG)

Aglomerasi adalah konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi dikawasan perkotaan karena penghematan akibat lokasi yang berdekatan (*economies of proximity*) yang diasosiasikan dengan kluster spasial dari perusahaan, para pekerja dan konsumen.

Perhitungan dalam penelitian ini mengikuti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jaime Bonet (2009), dimana Bonet menganalisis pengaruh variabel aglomerasi produksi terhadap ketimpangan pendapatan regional. Aglomerasi produksi ini dihitung dari share PDRB wilayah terhadap total PDRB. Bila ditulis secara matematis sebagai berikut:

$$Agi = \frac{PDRBi}{PDRBtot}$$

Keterangan:

- Agi = Aglomerasi Produksi Kabupaten/Kota di Banten
- PDRBi = Nilai kontribusi sektor industri pengolahan Atas Dasar
Harga Konstan 2000 Kabupaten/kota di Provinsi Banten

(Rupiah)

PDRB_{tot} = Nilai kontribusi sektor industri pengolahan Atas Dasar
 Harga Konstan 2000 di Provinsi Banten (Rupiah)

4. Pengeluaran Pemerintah (GE)

Pengeluaran pemerintah dibagi menjadi dua yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung sering disebut sebagai belanja pembangunan atau pengeluaran pembangunan, sedangkan belanja tidak langsung sering disebut dengan belanja atau pengeluaran rutin. Pada penelitian ini belanja langsung atau pengeluaran pembangunan dipakai untuk mencerminkan variabel pengeluaran pemerintah (GE). variabel pengeluaran pemerintah menggunakan data rasio pengeluaran pemerintah dengan satuan juta rupiah.

$$\text{Rasio GE} = \frac{\text{Jumlah Pengeluaran Pembangunan Pemerintah}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

5. Angkatan Kerja (AK)

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh J. Simanjuntak (1998), angkatan kerja adalah golongan tenaga kerja yang terdiri dari mereka yang bekerja dan yang menganggur dan mencari kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia 15-64 tahun yang bekerja dan penduduk belum bekerja namun siap untuk bekerja atau sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku. Data yang diperoleh dari BPS, yaitu Banten Dalam Angka tahun.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Data dalam penelitian ini bersumber dari instansi-instansi terkait. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah penggabungan dari deret berkala (*time series*) selama periode tahun 2001-2013 dan deret lintang (*cross section*) sebanyak 6 kabupaten/kota di Provinsi Banten. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data angkatan kerja dan penduduk tiap kabupaten/kota di Banten, diperoleh dari Badan Pusat Statistik dalam terbitan Banten Dalam angka tahun 2001-2013,
2. Data Produk Domestik Regional Bruto tiap kabupaten/kota di Banten, diperoleh dari Badan Pusat Statistik dalam terbitan Banten Dalam angka tahun 2001-2013,
3. Data Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri tiap kabupaten/kota di Banten, diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2001-2013.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat, dan realistis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengambilan data dari lembaga-lembaga terkait, yaitu BPS Propinsi Banten dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pustaka lain yang

digunakan sebagai pelengkap yaitu jurnal-jurnal yang berhubungan dengan masalah ketimpangan.

3.4 Metode Analisis

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode data panel serta menggunakan alat pengolahan data berupa aplikasi eviews 7. Analisis dengan menggunakan data panel merupakan kombinasi antara deret waktu (*time series*) dan deret lintang (*cross section*) (Gujarati, 2010), Model persamaan data *time series* ditulis sebagai berikut :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \mu_t ; t = 1, 2, \dots T$$

Di mana T adalah banyaknya data *time series*

Sedangkan model persamaan data *cross section* ditulis sebagai berikut :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \mu_i ; i = 1, 2, \dots N$$

Dimana N adalah banyaknya data *cross section*,

Mengingat data panel merupakan gabungan dari data *time series* dan *cross section*, maka model dapat ditulis dengan :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \mu_{it}$$

$$t = 1, 2, \dots, T ; \text{ dan } i = 1, 2, \dots N$$

Keterangan:

T = Banyak waktu

N = Banyaknya observasi

N x T = Banyaknya data panel

Menurut (Gujatrati, 2003), Adapun keuntungan dari perhitungan menggunakan regresi data panel dibanding dengan pendekatan *cross section* maupun *time series*, diantaranya:

1. Data panel dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan derajat kebebasan (*degree of freedom*), data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolinearitas antara variabel penjelas dimana dapat menghasilkan estimasi ekonometri yang efisien.
2. Data panel dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat diberikan hanya oleh data *cross-section* atau *time-series* saja.
3. Data panel dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data *cross-section*.

Dalam penelitian ini, analisis model data panel yang digunakan adalah pendekatan efek tetap (*fixed effect model*). Dilakukan uji Hausman untuk menguji model manakah yang digunakan antara pendekatan efek tetap atau pendekatan efek acak. Hasil uji Hausman dalam penelitian ini adalah model yang tepat digunakan adalah pendekatan efek tetap.

Tabel 3.1
Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	26.919201	3	0.0000

Hipotesis

H0 : Model *random effect*

H1 : Model *fixed effect*

Nilai probability Chi-Square adalah $0,0000 < 0,05$. Dengan demikian, kita menolak H_0 yang artinya model adalah model regresi Fixed Effect.

Dalam analisis model data panel, terdapat dua macam pendekatan yang sering digunakan, yaitu pendekatan efek tetap (*fixed effect*) dan pendekatan efek acak (*random effect*). Kedua pendekatan yang dilakukan dalam analisis data panel dapat dijelaskan sebagai berikut (Wahyudi, 2013) :

1. Pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effect*), salah satu kesulitan prosedur panel data adalah bahwa asumsi *intersep* dan *slope* yang konsisten sulit terpenuhi. Untuk mengatasi hal tersebut, yang dilakukan dalam data panel adalah dengan memasukkan variabel boneka (*dummy variable*) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda baik lintas unit (*cross section*) maupun antar waktu (*time-series*). Pendekatan dengan memasukkan variabel boneka ini dikenal dengan sebutan model efek tetap (*fixed effect*) atau *Least Square Dummy Variable* (LSDV).
2. Pendekatan Efek Acak (*Random Effect*), keputusan untuk memasukkan variabel boneka dalam model efek tetap (*fixed effect*) tak dapat dipungkiri akan dapat menimbulkan konsekuensi (*trade off*). Penambahan variabel boneka ini akan dapat mengurangi banyaknya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. Model data panel yang didalamnya melibatkan korelasi antar *error term* karena berubahnya waktu karena berbedanya observasi dapat di atasi dengan pendekatan model komponen error (*error component model*) atau disebut juga model acak (*random effect*).

Menurut Judge (dalam Wahyudi, 2013) terdapat 4 pertimbangan pokok untuk memilih antara menggunakan pendekatan efek tetap (*fixed effect*) atau pendekatan efek acak (*random effect*) dalam data panel :

- a. Apabila jumlah *time-series* (T) besar sedangkan jumlah *cross-section* (N) kecil, maka hasil *fixed effect* dan *random effect* tidak jauh berbeda sehingga dapat dipilih pendekatan yang lebih mudah untuk dihitung yaitu *fixed effect model* (FEM),
- b. Apabila N besar dan T kecil, maka hasil estimasi kedua pendekatan akan berbeda jauh. Jadi, apabila kita meyakini bahwa unit *cross-section* yang kita pilih dalam penelitian diambil secara acak (*random*) maka *random effect* harus digunakan. Sebaliknya, apabila kita meyakini bahwa unit *cross-section* yang kita pilih dalam penelitian tidak diambil secara acak maka kita harus menggunakan *fixed effect*,
- c. Apabila komponen *error* ϵ_i individual berkorelasi maka penaksir *random effect* akan bias dan penaksir *fixed effect* tidak bias,
- d. Apabila N besar dan T kecil, dan apabila asumsi yang mendasari *random effect* dapat terpenuhi, maka *random effect* lebih efisien dibandingkan *fixed effect*.

3.4.1 Estimasi Model Regresi Dengan Data Panel

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi pengaruh investasi, aglomerasi dan angkatan kerja terhadap tingkat ketimpangan tiap kabupaten/kota di Banten. Data yang digunakan adalah data *time series* selama periode tahun 2001 sampai 2013 dan data *cross section* sebanyak 6 kabupaten/kota di Banten. Hasil dari

kombinasi data *time series* dan *cross section* menghasilkan 78 observasi. Fungsi persamaan model regresi data panel dapat ditulis sebagai berikut :

$$ET_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 I_{it} + \alpha_2 AG_{it} + \alpha_3 GE_{it} + \alpha_4 AK_{it}$$

Keterangan :

ET	= Tingkat Ketimpangan spasial antar kabupaten dan kota
I	= Investasi
AG	= Aglomerasi
GE	= Pengeluaran Pemerintah
AK	= Angkatan Kerja
α_0	= Intersep
$\alpha_1 - \alpha_4$	= koefisien regresi variabel independen
μ_{it}	= <i>Error term</i>
i	= <i>cross section</i>
t	= <i>time series</i>

3.4.2 Estimasi Model Regresi Data Panel Dengan Penggunaan Variabel

Dummy

Menurut Gujarati (dalam Wahyudi, 2013) menyatakan bahwa estimasi model regresi data panel dengan pendekatan *fixed effect* dapat terpenuhi apabila memenuhi beberapa asumsi tersebut, antara lain :

- Intersep dan koefisien slope konstan sepanjang waktu dan ruang, Sedangkan *error term* mencerminkan perbedaan sepanjang waktu dan individu,
- Koefisien slope konstan, tetapi intersep bervariasi antar individu,

- c. Koefisien slope konstan, tetapi intersep bervariasi untuk setiap individu dan waktu,
- d. Semua koefisien (baik intersep maupun koefisien slope) bervariasi untuk setiap individu,
- e. Intersep dan koefisien slope bervariasi untuk setiap individu dan waktu.

Berdasarkan asumsi ke 2 yang diutarakan Gujarati tentang koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu, maka menguatkan peneliti dalam menganalisis tingkat ketimpangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi (kasus : 6 kabupaten/kota di Banten selama periode tahun 2001 hingga 2013) untuk menggunakan pendekatan *Fixed Effect*. Penelitian ini mengasumsikan intersep tiap individu (kabupaten/kota) memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga penelitian ini memasukkan variabel *dummy* untuk menyatakan perbedaan intersep tiap individu. Oleh karena itu, persamaan dalam penelitian ini sering disebut dengan istilah *Least Square Dummy Variabel* (LSDV).

Berkaitan dengan penggunaan persamaan *Least Square Dummy Variabel* (LSDV), maka penelitian ini membutuhkan satu wilayah yang menjadi wilayah acuan (*benchmark*). Oleh karena itu, penelitian ini menjadikan kota Tangerang menjadi wilayah acuan yang dikarenakan memiliki rata-rata tingkat ketimpangan terendah dibandingkan wilayah (kabupaten/kota) lain di Banten. Maka model persamaan dengan *Least Square Dummy Variabel* dapat ditulis sebagai berikut:

$$ET_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 I + \alpha_2 AG + \alpha_3 GE + \alpha_4 AK + \beta_1 D_1 + \beta_2 D_2 + \beta_3 D_3 + \beta_4 D_4 + \beta_5 D_5 + \mu_{it}$$

ET = Tingkat Ketimpangan spasial antar kabupaten dan kota

I	= Investasi
AG	= Aglomerasi
GE	= Pengeluaran Pemerintah
AK	= Angkatan Kerja
D ₀	= <i>Dummy</i> Kota Tangerang (<i>Benchmark</i>)
D ₁	= <i>Dummy</i> Kabupaten Pandeglang
D ₂	= <i>Dummy</i> Kabupaten Lebak
D ₃	= <i>Dummy</i> Kabupaten Tangerang
D ₄	= <i>Dummy</i> Kabupaten Serang
D ₅	= <i>Dummy</i> Kota Cilegon
α_0	= Intersep
$\alpha_1 - \alpha_4$	= koefisien regresi variabel independen
$\beta_1 - \beta_6$	= Koefisien dummy wilayah
μ_{it}	= <i>Error term</i>
i	= <i>cross section</i>
t	= <i>time series</i>

3.4.3 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk menghasilkan estimator linear tidak bias yang terbaik (*Best Linear Unbiased Estimator/ BLUE*). Kondisi ini akan terjadi jika data yang digunakan terbebas dari adanya penyakit-penyakit seperti: autokorelasi, multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta ketidakterdistribusian data secara normal. Adapun cara yang digunakan untuk menguji penyimpangan asumsi klasik adalah sebagai berikut :

a. Deteksi Multikolinearitas

Deteksi multikolinearitas bertujuan untuk menguji, apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independent variable). Deteksi multikolinearitas terjadi hanya pada regresi ganda. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi tinggi diantara variabel bebas dari suatu model regresi maka dikatakan terdapat masalah multikolinearitas dalam model tersebut. Masalah multikolinearitas mengakibatkan adanya kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan.

Ada beberapa cara yang biasa digunakan untuk mendeteksi terjadinya multikolinearitas menurut Gujarati (2010), dapat dideteksi dari gejala sebagai berikut:

1. Bila nilai R^2 yang dihasilkan sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel independen.
2. Melakukan regresi parsial dengan cara:
 - a. Melakukan estimasi model awal dalam persamaan sehingga didapat nilai R^2 .
 - b. Melakukan auxiliary regression pada masing-masing variabel penjelas.
 - c. Bandingkan nilai R^2 dalam model persamaan awal dengan R^2 pada model persamaan regresi parsial, jika nilai regresi parsial lebih tinggi maka didalamnya terdapat multikolinearitas.
3. Melakukan korelasi antar variabel-variabel independen. Bila nilai korelasi independen lebih dari 0,8 maka terdapat multikolinearitas

b. Deteksi Autokorelasi

Menurut Ghozali (2005), deteksi autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear, terdapat korelasi antara *error term* pada periode t dengan *error term* pada periode $t - 1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Dalam penelitian ini guna mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi, maka dilakukan dengan cara melakukan uji *Breusch-Godfrey*, yaitu membandingkan nilai *Obs*R-squared* hasil uji *Breusch-Godfrey* dengan nilai χ^2 (*Chi-square*) tabel. Apabila nilai *Obs*R-squared* hasil uji *Breusch-Godfrey* lebih kecil dibanding nilai χ^2 (*Chi-square*) tabel, maka model ketimpangan terbebas dari penyakit autokorelasi.

c. Deteksi Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2005) deteksi heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya heteroskedastisitas.

Dalam penelitian ini guna mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas, maka dilakukan dengan cara melakukan uji *White*, yaitu membandingkan nilai *Obs*R-squared* hasil uji *White* dengan nilai χ^2 (*Chi-square*) tabel. Apabila nilai *Obs*R-squared* hasil uji *White* lebih kecil dibanding nilai χ^2 (*Chi-square*) tabel, maka model ketimpangan terbebas dari penyakit heteroskedastisitas.

d. Deteksi Normalitas

Menurut Ghazali (2005) deteksi normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah memiliki data yang terdistribusi secara normal atau mendekati normal.

Dalam penelitian ini guna mendeteksi apakah data terdistribusi secara normal atau tidak adalah mengikuti Ghazali (2005) adalah untuk mendeteksi normalitas data dapat juga dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov menggunakan hipotesis pengujian, yaitu:

Hipotesis Nol (H_0) = Data terdistribusi secara normal

Hipotesis Alternatif = Data tidak terdistribusi secara normal

Apabila probabilitas signifikansi lebih besar dari $\alpha = 0,05$ hal ini berarti hipotesis nol diterima atau variabel independen terdistribusi secara normal.

3.4.4 Pengujian Statistik

Pengujian Statistik bertujuan untuk mengukur hasil estimasi pada suatu model guna menjelaskan hasil tersebut. Adapun yang termasuk dalam pengujian statistik yaitu koefisien determinasi (R^2), Uji Statistik t, serta Uji F.

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan alat ukur untuk menilai seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol sampai satu. Nilai (R^2) yang kecil mengartikan bahwa kemampuan variabel-variabel dependen dalam

menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Sedangkan Nilai (R^2) yang mendekati satu mengartikan bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Dalam penelitian ini menggunakan nilai *Adjusted* (R^2), dikarenakan nilai *Adjusted* (R^2) telah disesuaikan dengan banyaknya df (*degree of freedom*). Sehingga lebih tepat dan sesuai dengan model penelitian ini, mengingat penggunaan data panel yang mengakibatkan df menjadi besar.

b. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). Dalam penelitian ini guna menguji pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen maka dilakukan dengan cara membandingkan nilai t statistik dengan nilai t tabel dengan penggunaan ($\alpha = 5$ persen). Sehingga dapat ditulis sebagai berikut:

1. $H_0 : \alpha_1 \leq 0$, tidak terdapat pengaruh signifikan secara statistik variabel Investasi terhadap variabel tingkat ketimpangan.
 $H_0 : \alpha_1 > 0$, terdapat pengaruh negatif dan signifikan secara statistik variabel Investasi terhadap variabel tingkat ketimpangan.
2. $H_0 : \alpha_2 \leq 0$, tidak terdapat pengaruh signifikan variabel aglomerasi terhadap variabel tingkat ketimpangan.
 $H_0 : \alpha_2 > 0$, terdapat pengaruh positif dan signifikan secara statistik variabel aglomerasi terhadap variabel tingkat ketimpangan.

3. $H_0 : \alpha_3 \leq 0$, tidak terdapat pengaruh signifikan secara statistik variabel angkatan kerja terhadap variabel tingkat ketimpangan.

$H_0 : \alpha_3 > 0$, terdapat pengaruh negatif dan signifikan secara statistik variabel angkatan kerja terhadap variabel tingkat ketimpangan.

c .Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji simultan bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Algifari, 1997). Dalam penelitian ini guna memastikan apakah variabel independen (investasi, aglomerasi, dan angkatan kerja) mampu menaksir variabel dependen (tingkat ketimpangan), maka dilakukan dengan cara membandingkan F statistik dengan F tabel dengan penggunaan ($\alpha = 5$ persen). Sehingga dapat ditulis sebagai berikut :

1. Apabila F statistik $>$ F tabel maka H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan secara statistik terhadap variabel dependen.
2. Apabila F statistik $<$ F tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.